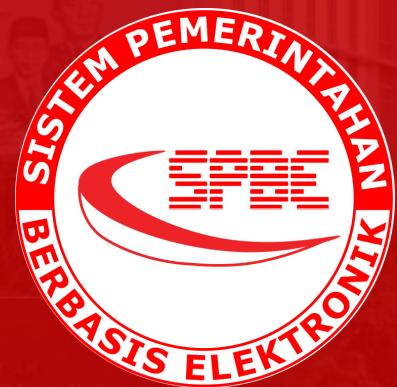




**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**





MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SPBE

**DOMAIN
LAYANAN SPBE
INDIKATOR 32-47**



INSTRUKTUR DOMAIN LAYANAN SPBE

**Dr.Rer.Nat. I Made Wiryanan,
S.Kom., S.SI., MAPPSC
UNIVERSITAS GUNADARMA**



✓ Riwayat Pendidikan

- **S3, Bidang Informatik, Bielefeld, Germany**
- **S2, Bidang Computer Studies, Edith Cowan University, Australia**
- **S1, Bidang Fisika, Universitas Indonesia, Jakarta**
- **S1, Bidang Teknik Informatika, Universitas Gunadarma, Jakarta**



✓ Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Universitas Gunadarma



✓ Pengalaman SPBE

- **2018 – 2019, Tim Evaluator Eksternal dan Instruktur Asistensi/Piloting Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), KEMENPANRB**
- **Koordinator Teknis, Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia**
- **Tim Pakar pada pengembangan pelatihan First Responder berbasis SNI 27037**
- **Tim ahli pengembangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Enterprise Architecture Design dan Cloud Computing**



Domain 4: Layanan SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
32	Layanan Perencanaan
33	Layanan Penganggaran
34	Layanan Keuangan
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
36	Layanan Kepegawaian
37	Layanan Kearsipan Dinamis
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (SIMAKBMN)--- focus asset IT, SIMDABMJ
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (WBS)
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Lakip, e-Sakip, LPPD, e-kinerja)
41	Layanan Kinerja Pegawai (SIASN, SIMPEGNAS)



**INSTRUKTUR
DOMAIN LAYANAN SPBE**

Ir. KHAKIM GHOZALI, M.MT.

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Riwayat Pendidikan

- S2, Manajemen Teknologi Informasi , Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- S1, Teknik Elektro – Komputer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.



Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Pengalaman SPBE

- 2020 : Evaluator Eksternal SPBE
- 1999 – 2018, Pengalaman Sebagai Evaluator TIK, antara lain: Review Implementasi Aplikasi Government Resources Management, Evaluasi Capaian Master Plan Smart City, Evaluasi Capaian Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan masih banyak lagi.
- 2001 – 2020, Pengalaman Penyusunan Rencana Induk SPBE/TIK di berbagai Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2012 – 2017, Pengalaman Sebagai Narasumber TIK di berbagai kesempatan
- 2000 – 2019, Pengalaman Dalam Pembuatan Aplikasi di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

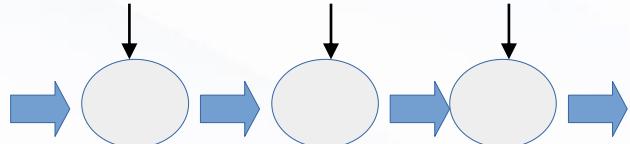


Domain 4: Layanan SPBE

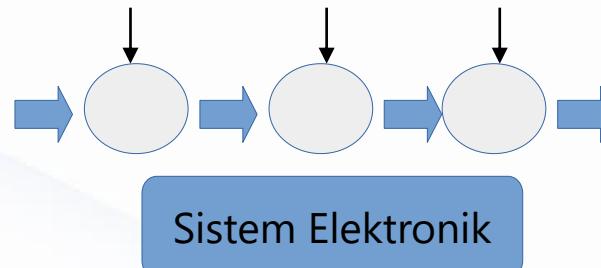


Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
43	Layanan Data Terbuka
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
45	Layanan Publik Sektor 1
46	Layanan Publik Sektor 2
47	Layanan Publik Sektor 3

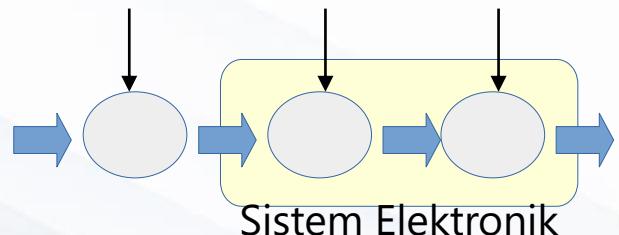
Perubahan Kerja dengan TIK



Layanan tanpa TIK

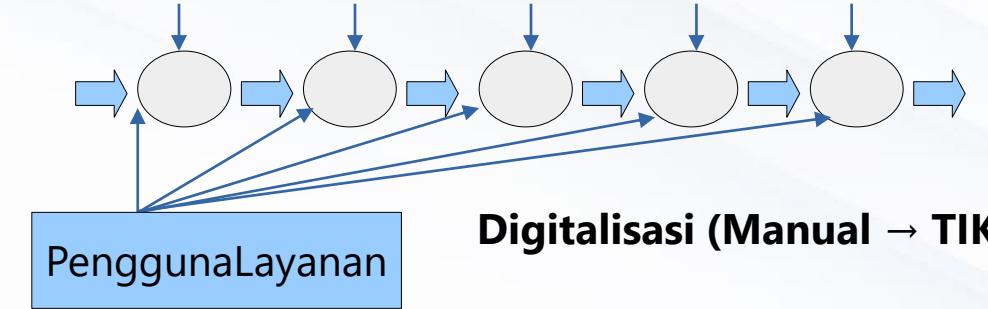


Layanan DIDUKUNG
Sistem Elektronik

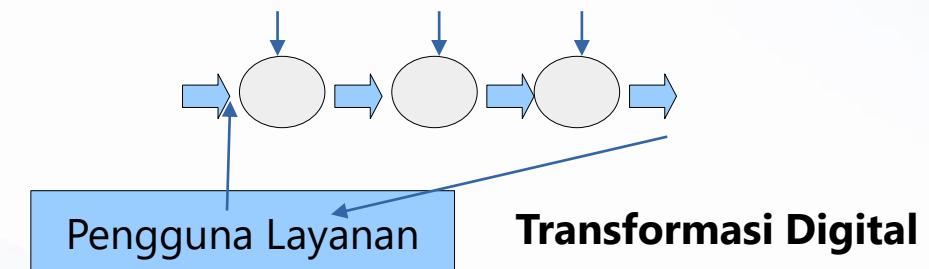
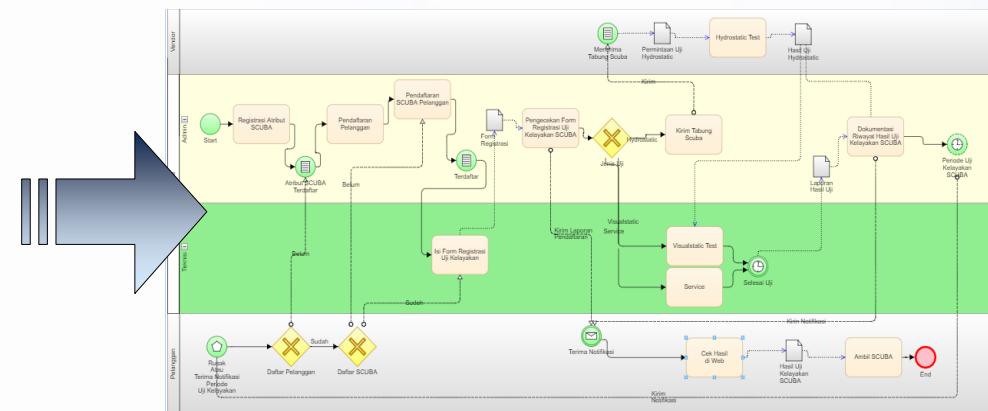


Layanan BERBASIKAN
Sistem Elektronik

berubah karena
adanya sistem
elektronik (dilakukan
*Business Process
Reengineering*)



Digitalisasi (Manual → TIK)

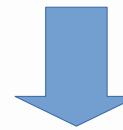


Transformasi Digital

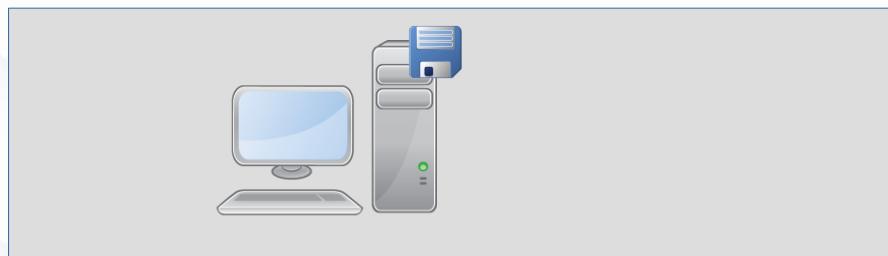
Layanan



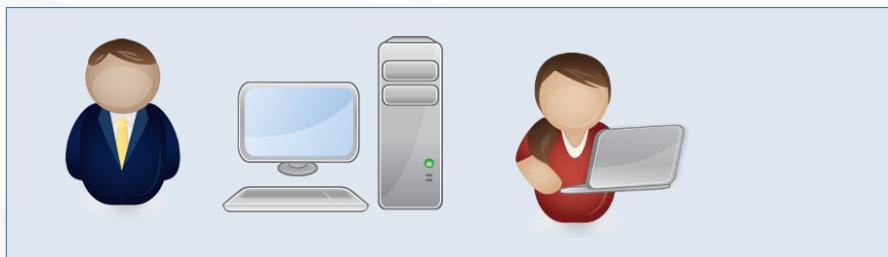
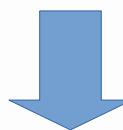
Program Aplikasi [Software]



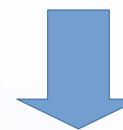
Program Aplikasi + Komputer



Sistem Informasi



Layanan Sistem
Informasi

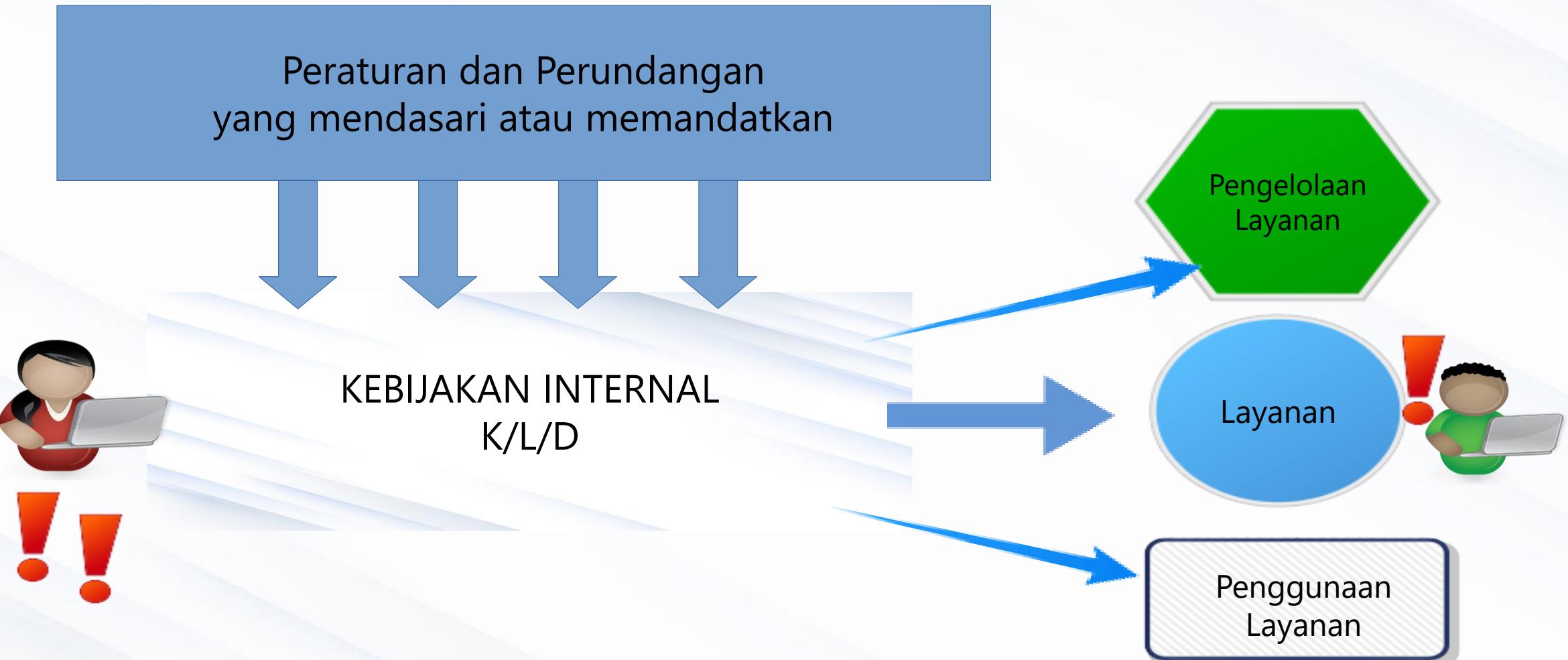


***Layanan terintegrasi dan kolaboratif
secara menyeluruh,
adaptif secara berkesinambungan***

SDM Pengelola +
Data/Infomasi

SDM Pengelola
Manajemen+Tata
Kelola
Kebijakan
Pengguna

Kebijakan Internal → Layanan



Tingkat kematangan dan evidence



1

Memberikan informasi 1 arah

2

pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.

3

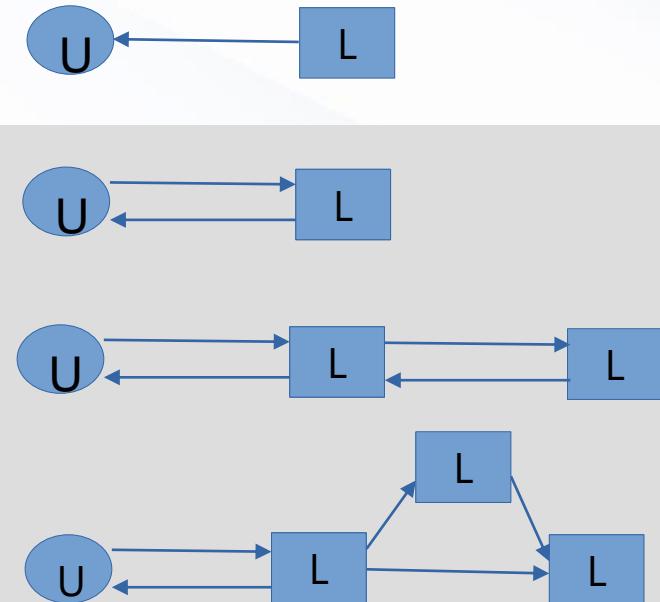
layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

4

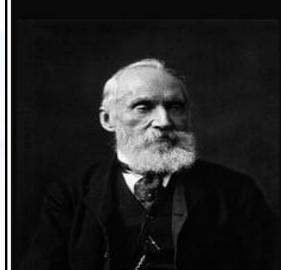
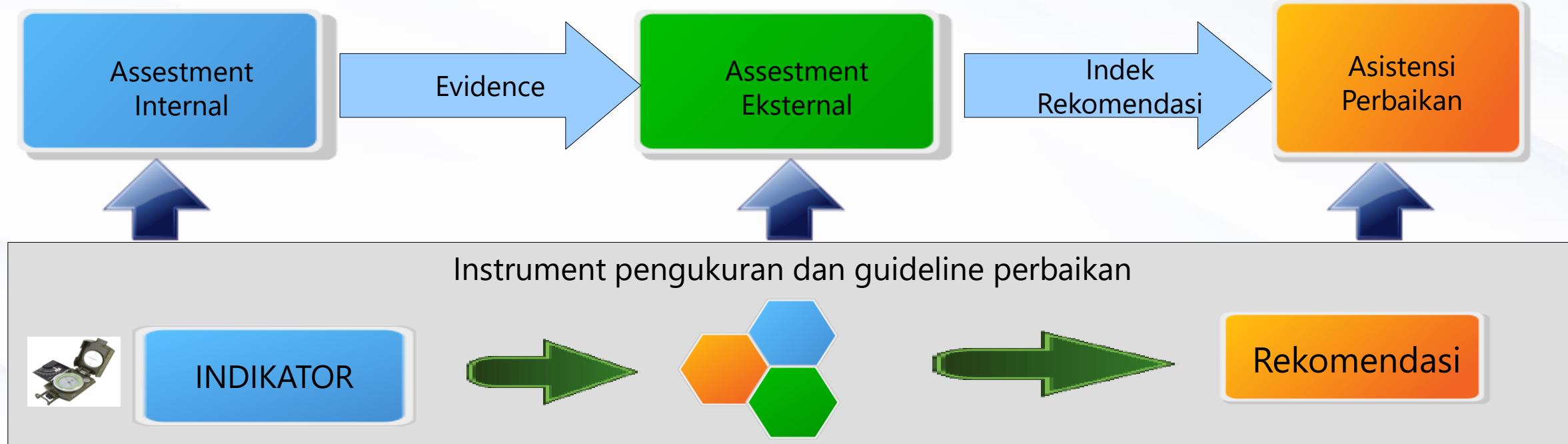
layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain

5

Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti



Fungsi Indikator



I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it; but when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind: it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever the matter may be.

(Lord Kelvin)

izquotes.com

- Indeks bukan hanya untuk assessment/ranking
- Bisa untuk perbaikan secara mudah oleh K/L/D
- Pendekatan evidence—guidance, dibanding ekspert atau kuesioner

Sistem Elektronik dan Layanan Publik

Perencanaan



Pelaksanaan



Pengawasan



Penindakan



Data Perencanaan

Data Pelaksanaan

Data Pengawasan

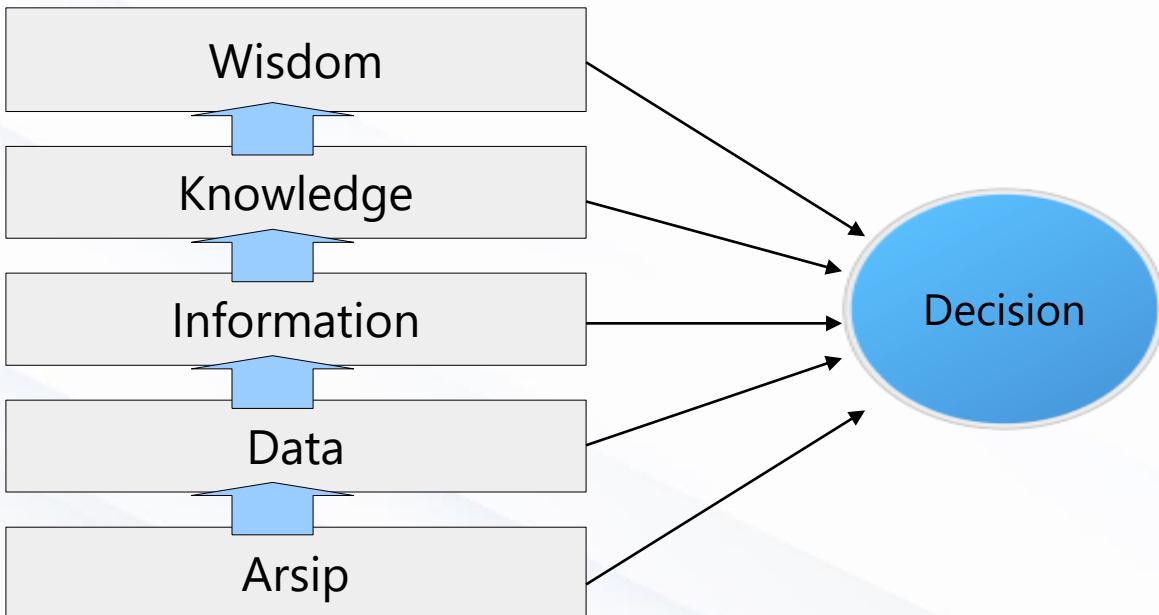
Data Penindakan

Penggunaan data/fungsi bersama - interoperabilitas



Integrasi Multistakeholder

- Interoperabilitas di sistem yang heterogen
- Beragam organisasi dapat bertukar data/informasi
- Beragam teknologi dapat bertukar data/informasi
- Dibutuhkan “central point” sebagai penyelaras data/informasi

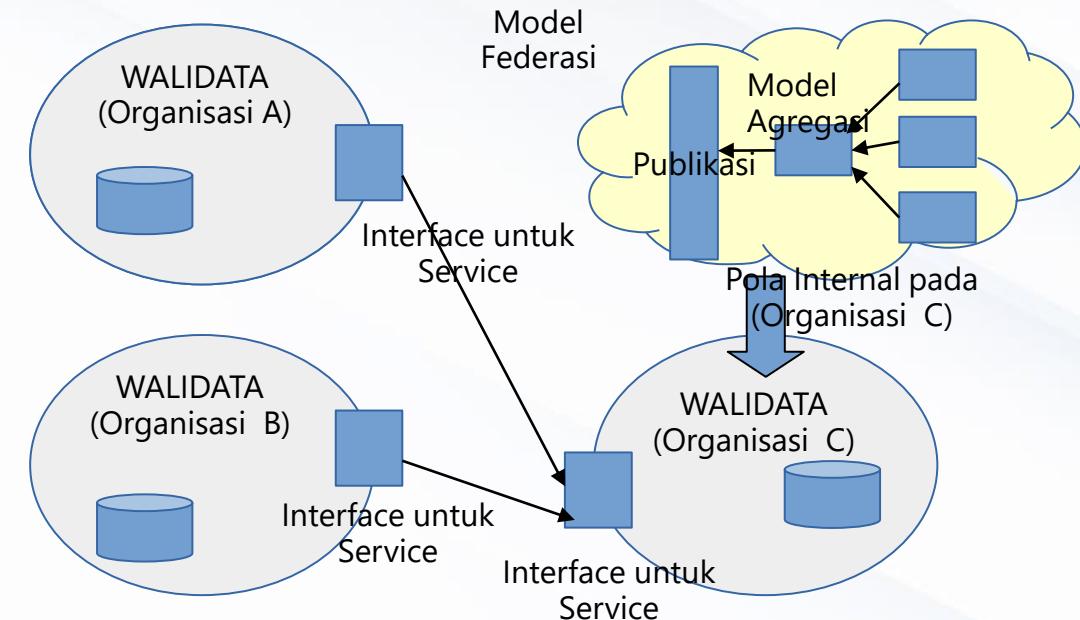
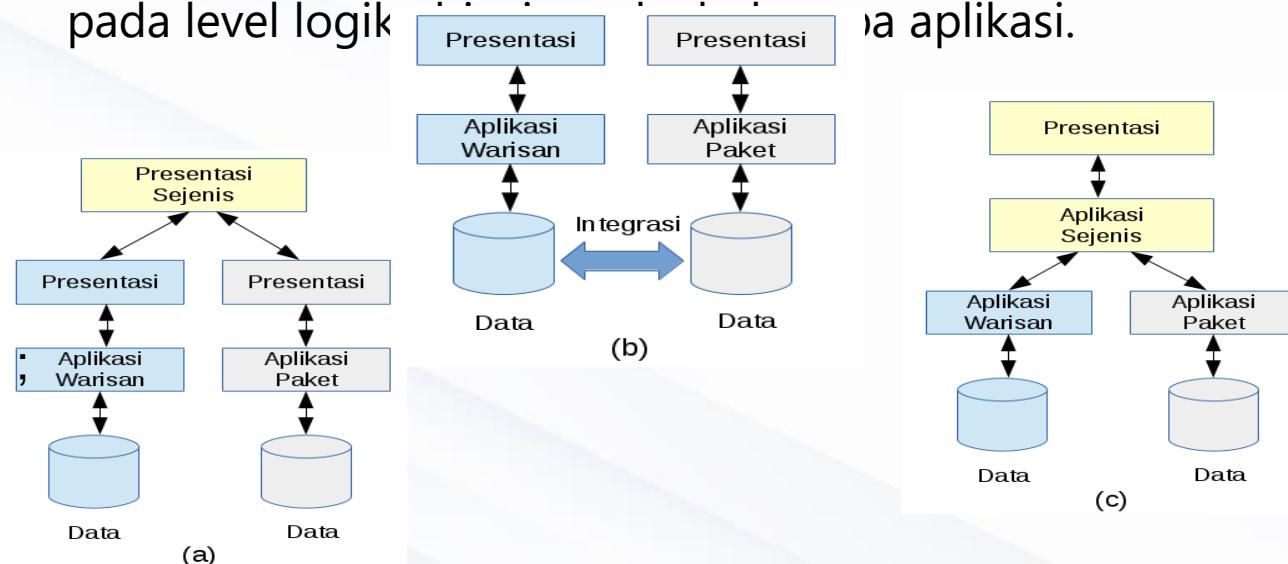


Jenis integrasi

- **Integrasi Presentasi.** User interface yang menyediakan akses pada suatu aplikasi. kinerja, persepsi, dan tidak adanya interkoneksi antara aplikasi dan data.

- **Integrasi Data.** Dilakukan langsung pada basis data atau struktur data. Jika terjadi perubahan model data, maka integrasinya perlu direvisi atau dilakukan ulang.

- **Integrasi Fungsional** Proses integrasi dilakukan pada level logik



- Sistem informasi di masing-masing organisasi tidak bisa bertukar data/informasi
- Interoperabilitas data akan mengefisienkan kerja serta dapat melakukan prediksi dan analisis untuk decision support system

Tahap Integrasi kolaboratif



Semua pihak
Sepakat tujuan



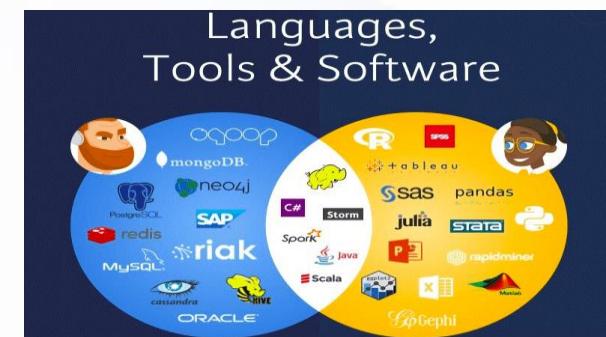
! Sudah ada dalam
Renstra Tahunan



! Anggaran sudah
disiapkan

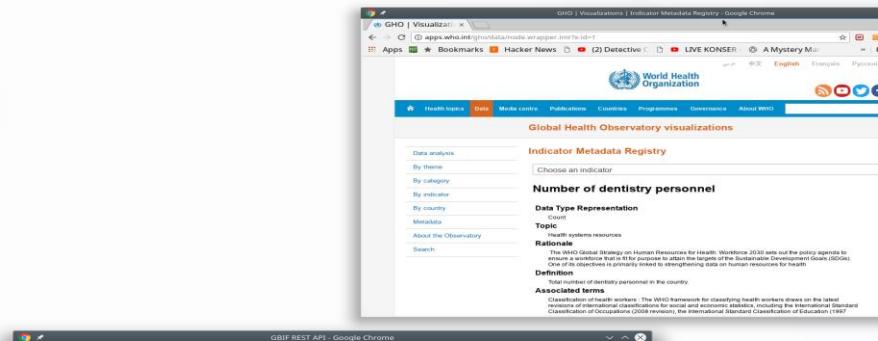


Peraturan tidak
bertabrakan

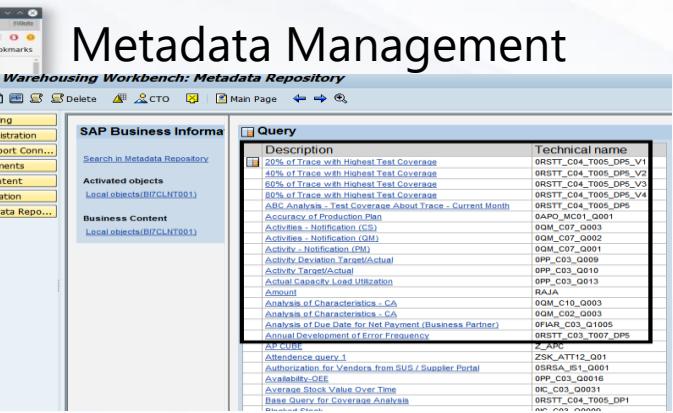


Komponen Pendukung Integrasi

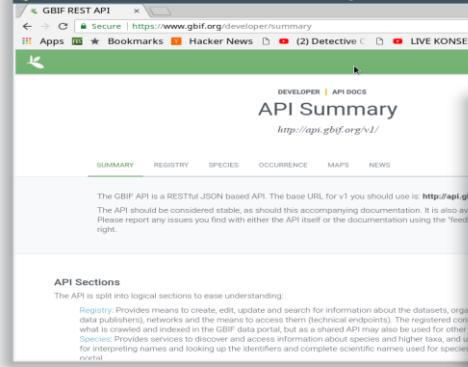
- Metadata Management
 - Mencatat data dan sumber data
 - Metadata terkait
- Service Directory
 - Mencatat layanan data yang diberikan
 - Lembaga lain dapat memanfaatkan data dan analisis yang ada
- Dukungan SDMX
 - Statistical Data and Metadata Exchange Protocol merupakan ISO standard untuk menjelaskan data statistik dan metadatanya
 - Memudahkan pertukaran data statistik antar lembaga sejenis



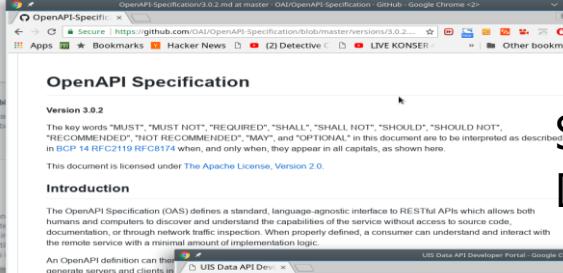
Metadata Management

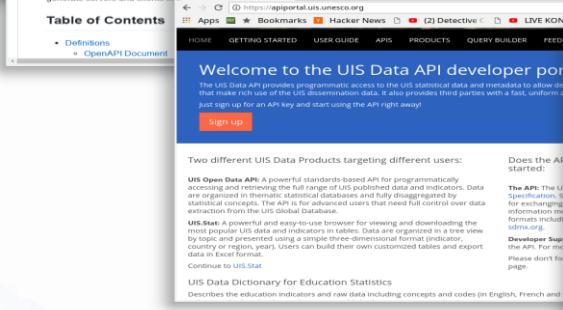


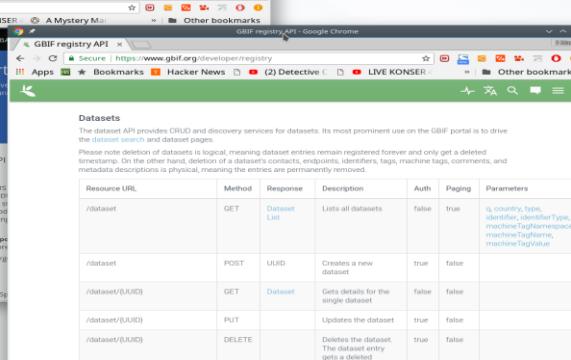
Service Directory



SDMX Protocol



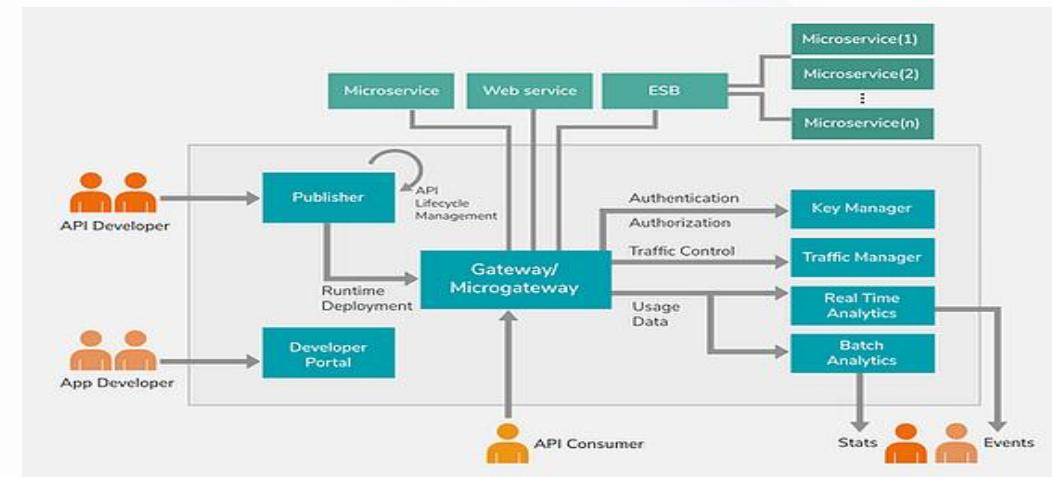




Teknologi Integrasi



- Tahun 80-an
 - Remote Procedure Call (RPC) dengan C/C++
 - Electronic Data Interchange (EDI) dengan ASN.1
 - Distributed Component Object Model (DCOM)
- Tahun 90-an
 - CORBA (Unix/Linux)
 - Web dan Http
- 1998
 - XML kemudian XML-RPC
 - Service Oriented Architecture (SOA)
- 2000
 - Web Service : Universal Discovery Discovery and Integration (UDDI), Web Service Description Language, SOAP
- 2010-an
 - REST (dipelopori Ray Fielding), persis besar kembali ke http dengan REST
- 2015-an
 - GraphQL
 - gRPC





Persiapan Assestment Layanan

- Mengenali aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan K/L/D dalam menyediakan Layanan Pemerintah
 - Misal SIKDA, SIPP, JDIH,
 - eBudgeting, dsb
 - Mengenali aplikasi berbagi pakai : SPSE, Srikandi, SAPK → SIASN,
- Mengenali “evidence” dari aplikasi tersebut (misal login screen, output)
 - Tidak cukup hanya login screen
 - User manual, atau video
 - Lebih baik kalau ada “dummy account”
- Mengenali proses integrasi yang dapat dilakukan oleh aplikasi-aplikasi tersebut
- Diskusi dan sharing dengan sesama assesor → Kompendium aplikasi

Kelengkapan Evidence

- Assestment SPBE berbasiskan Evidence. Seringkali evidence belum cukup untuk menggambarkan layanan yang akan dinilai. Pencarian justifikasi dari evidence membutuhkan waktu yang lama, dan **sulit dilakukan oleh asessor** eksternal karena hanya diketahui oleh instansi (misal API, screen aplikasi) ataupun pada sisi internal sistem (harus login dengan user name yang valid)

- Permasalahan:

- Tidak jelas bukti yang diberikan terkait pada indikator mana. Bukti dikumpulkan tanpa penanda dan penjelasan yang jelas.
 - Tidak lengkap menggambarkan jalannya Layanan], sehingga asesor harus memperkirakan maksud evidence tersebut
 - Tidak lengkap untuk menggambarkan tingat layanan tersebut (misal kolaborasi, tapi tida bukti yang menunjukkan evidence tersebut
 - Asesor eksternal sulit mencoba langsung layanan tersebut (tidak ada dummy account)

- Solusi:

- Pencatatan secara terstruktur evidence, secara lengkap dengan annotasi (penandaan) dan penjelasan yang cukup lengkap, dengan index bukti yang unik
 - Dilengkapi dengan bentuk bukti lain misal, animasi, flow UI ataupun dummy account

Asessor
Internal

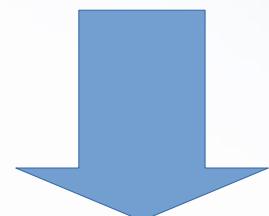
Indikator



Evidence



Penjelasan Evidence

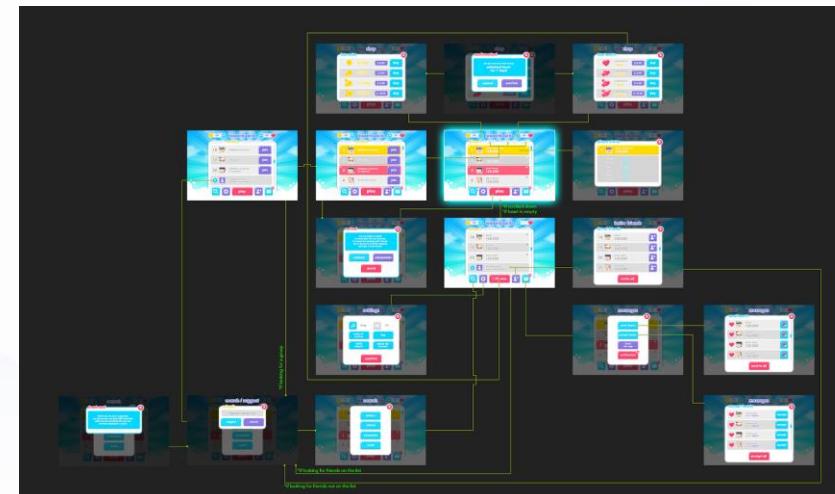


Jenis Evidence

- Buku manual
- Screen shot (dalam bentuk flow program)
- Animasi singkat per fitur
- API
- Katalog Data
- Penjelasan kolaborasi

Dokumentasi API

Flow screen shoot

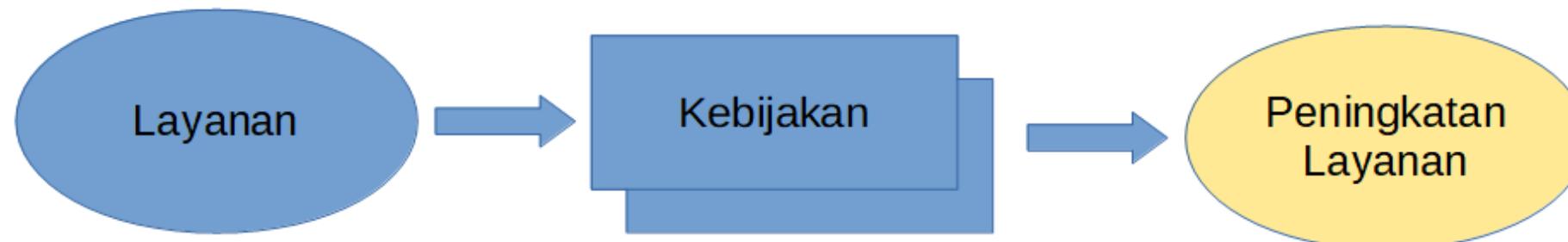


Daftar Evidence

No Indikator	Nama Layanan	Nama SIM	Unit Pengelola	Klaim indikator	Evidence	Keterangan
Berikan no yang unik untuk semua evidence sehingga mudah ditemukan oleh asesor	Berikan nama layanan sesuai indikator SPBE. Sebab bisa satu aplikasi berkontribusi pada 2 indikator layanan	Berikan nama Sistem Informasi (SIM) yang digunakan sebagai evidence.	Unit pengelola layanan atau SIM tersebut.	Indikator yang diklaim dengan evidence itu. Nilai dari 1-5. Jadi misal evidence ini menunjukkan pertukaran data dapat ditulis 4 (kolaborasi)	Evidence yang diberikan misal screenshot, nomor X, animasi nomor Y, atau user manual dsb	Keterangan tambahan yang diberikan untuk menjelaskan layanan tersebut terkait indikator

Peningkatan Index SPBE

Strategi 1



Pilih Aplikasi Berbagi Pakai

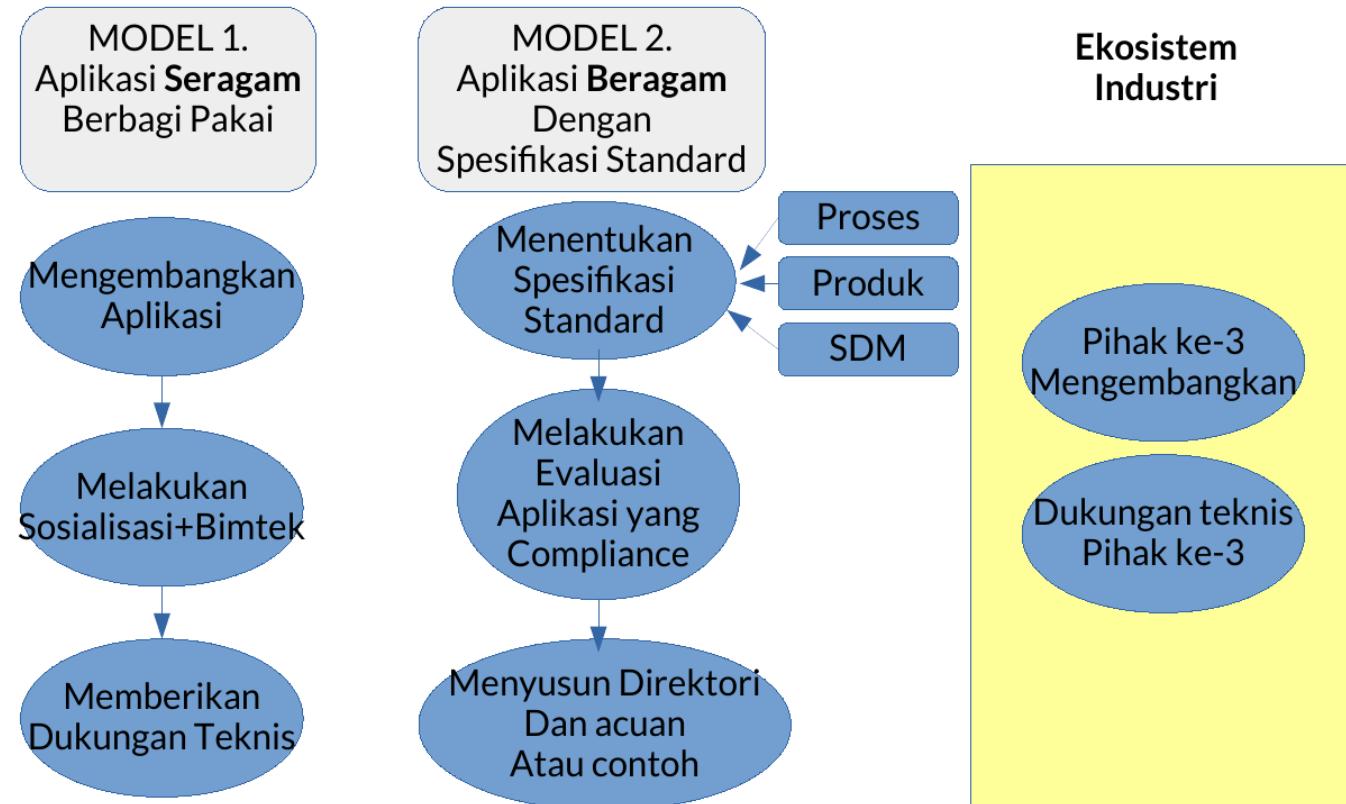
Strategi 2



Pilih Aplikasi Berbagi Pakai

Aplikasi berbagi pakai

- Opsi 1. Lembaga pemerintah sebagai *software house*
 - Developer team
 - Support team
 - Training team
 - Permasalahan “core business” dan kapasitas organisasi (SDM, organisasi, jam kerja)
- Opsi 2. Lembaga pemerintah sebagai pengatur dan central point (clearance house)
 - Perlu pendefinisian standard-standard
 - Perlu menentukan tata kelola serta mekanisme monev kepada pelaksana
 - Menyusun mekanisme koordinasi dan instrumen bantunya



FOKUS PADA PEMENUHAN PROSES BISNIS

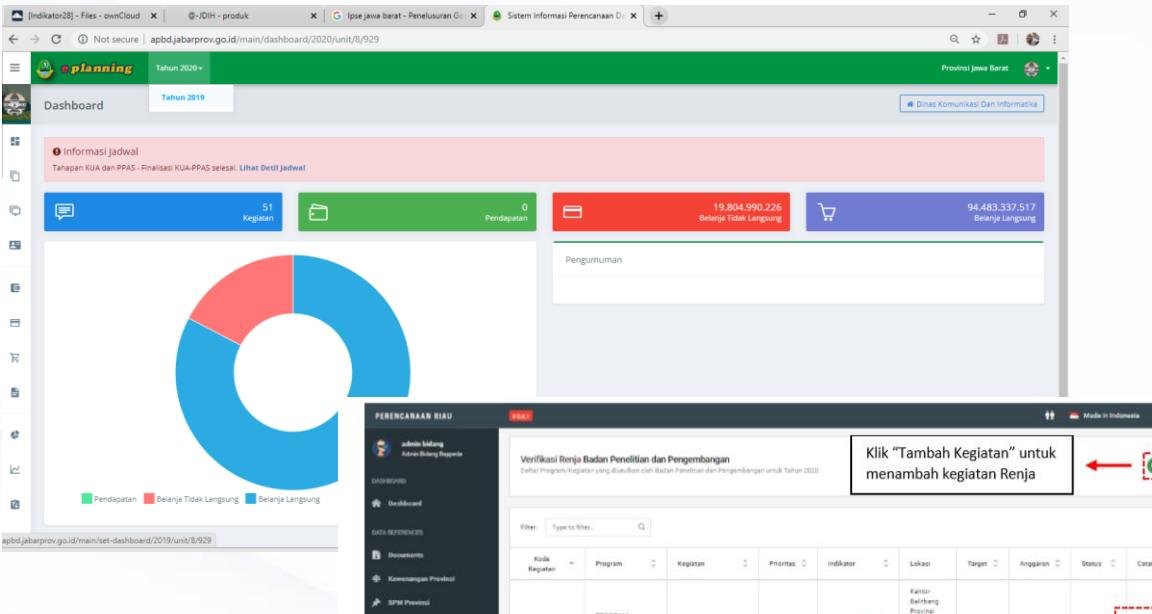


Indikator 32

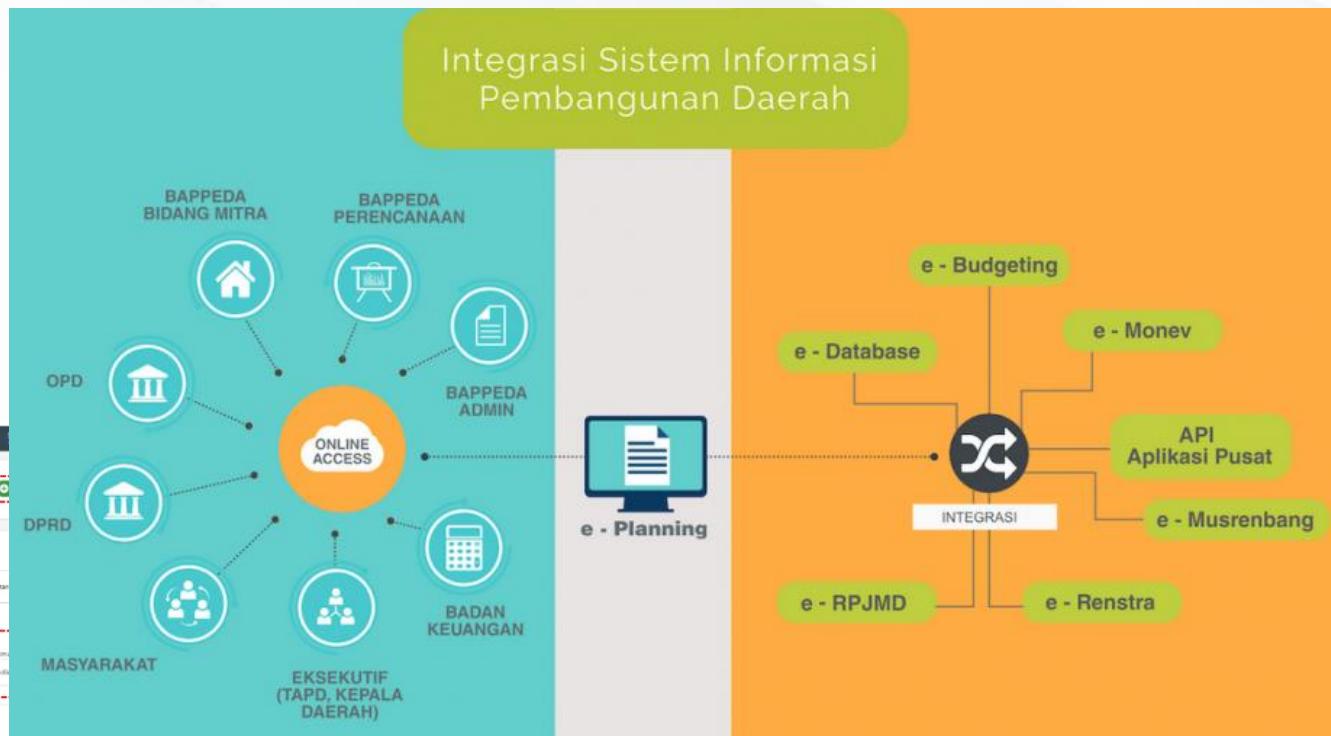
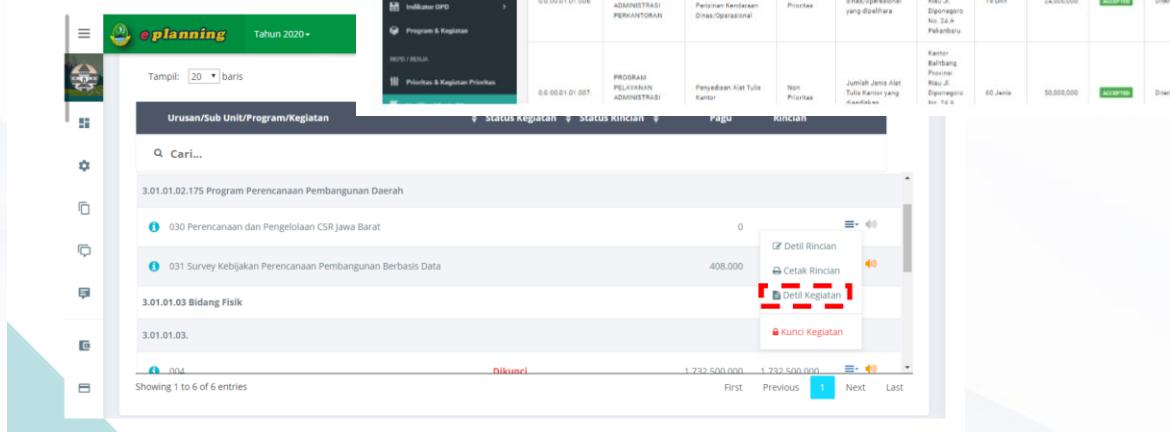


Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait perencanaan kegiatan pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen perencanaan.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Indikator 32



Klik tombol DETAIL KEGIATAN u
rekomenadasi



“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 33



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait penganggaran kegiatan pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait penganggaran kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen penganggaran, dan pengunduhan dokumen penganggaran.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan perencanaan berbasis elektronik, layanan keuangan berbasis elektronik, layanan pengadaan berbasis elektronik, layanan penganggaran berbasis elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			



Penganggaran-eBudgeting



E-BUDGETING SYSTEM



The screenshot shows the RKA (Renewal of Work Plan and Budget) and RAB (Renewal of Budget Allocation) modules. The RKA table shows the following data:

No	OPD	KUA / PPA	RKA	Selisih
40	KECAMATAN BATANG	70.000.000	16.500.000	-53.500.000
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.200.000.000	895.700.000	-304.300.000

The RAB table shows the following data:

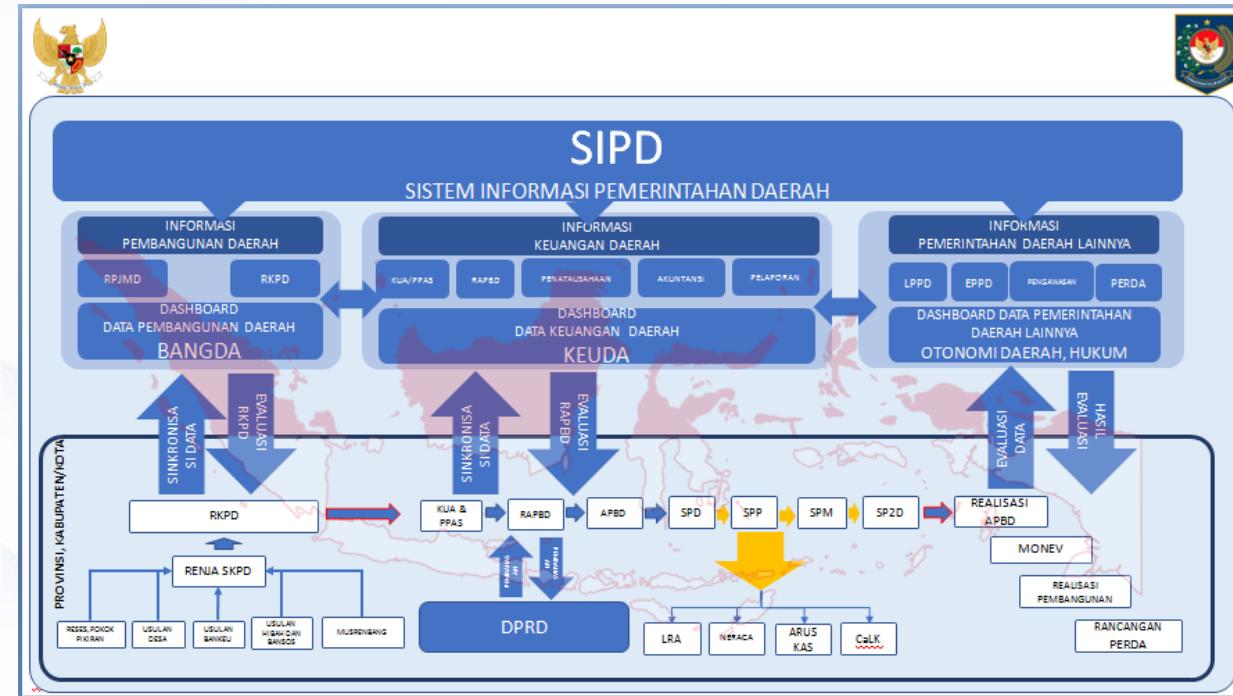
Kode RKA	Uraian Acara	Tanggal	Lokasi	Status	Action
Program : 06 Output : 001 Sub Output : 001 Komponen : 053 Sub Komponen: A	Acara 2	10 Feb 2016	Jakarta	Belum Diajukan	<input checked="" type="checkbox"/> Ajukan <input type="checkbox"/> Edit <input type="checkbox"/> Add Transaksi
Program : 06 Output : 001 Sub Output : 001 Komponen : 053 Sub Komponen: A	acara 1	1 Feb 2016	Jakarta	Close	<input type="checkbox"/> View Transaksi <input type="checkbox"/> Cetak Rincian



Indikator 34

Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Keuangan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait keuangan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait keuangan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Keuangan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Sistem Keuangan





Indikator 35



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengadaan barang dan jasa di Instansi Pusat/Pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengadaan barang dan jasa seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengadaan barang dan jasa seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Layanan Pengadaan



MEMUNCULKAN PERAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
sebagai pelaksana
Swakelola

**POIN
PERUBAHAN**

PELAKSANAAN PENELITIAN
DIATUR KHUSUS





Indikator 35



The screenshot shows the LPSE Provinsi Bali website. At the top, there is a banner with the text '#PASARSABANGMERAUKE' and '#BANGGABUATANINDONESIA'. Below the banner, there is a section for tenders and a section for announcements. The announcements section lists several tenders:

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
1	Pengadaan Barang		
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha		
3	Pekerjaan Konstruksi		

Below the announcements, there is a section for 'Pengumuman dan Berita' with the following entries:

Date	Content
19 April 2017 07:30	Pengadaan Jasa Pelaksana Renovasi Command Center
19 September 2016 12:54	Pengadaan Renovasi Ruang Data Center

The screenshot shows a list of tenders on the LPSE Provinsi Bali website. The table includes columns for Kode, Nama Paket, Instansi, Tahap, and HPS. The data is as follows:

Kode	Nama Paket	Instansi	Tahap	HPS	
9127033	Belanja Obat, BMHP dan Reagen	spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	250,7 Jt
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Pengadaan Langsung				
	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				
9126033	Belanja Obat, BMHP dan Reagen	spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	71,6 Jt
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Pengadaan Langsung				
	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				
9122033	DED Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Tejakula dan SMAN SATAP Nusa Penida	spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	99,6 Jt
	Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2020 - Pengadaan Langsung				
	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				
9120033	DED Tahap I Pembangunan SMKN 2 Kuta Selatan	spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Upload Dokumen Penawaran	100 Jt
	Jasa Konsultansi Badan Usaha - TA 2020 - Pengadaan Langsung				
	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				
9117033	Belanja BHP Gizi	spse 4.3	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi [...]	179,4 Jt
	Pengadaan Barang - TA 2020 - Pengadaan Langsung				
	Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat				

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi

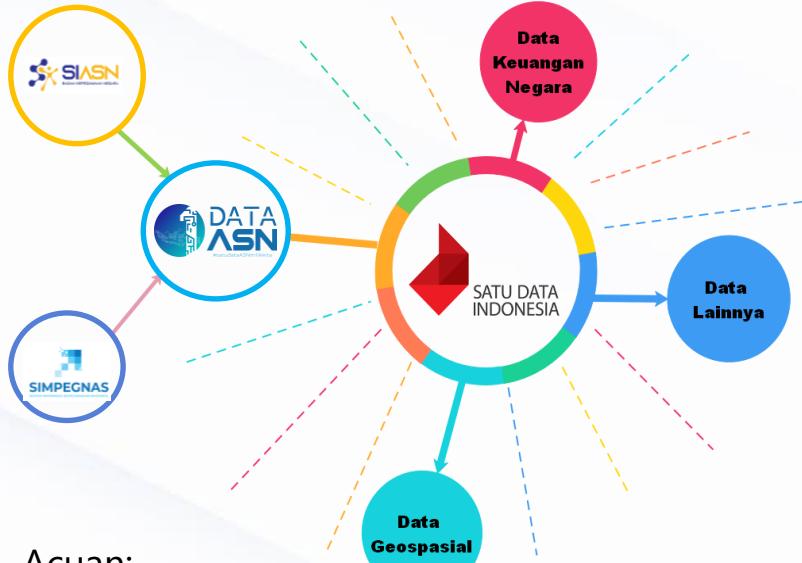


Indikator 36



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik				
Tingkat	Kriteria	Capaian			
1	Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kepegawaian.				
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kepegawaian seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.				
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.				
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Kinerja Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.				
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.				
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5				
Penjelasan :					
Data dukung:					

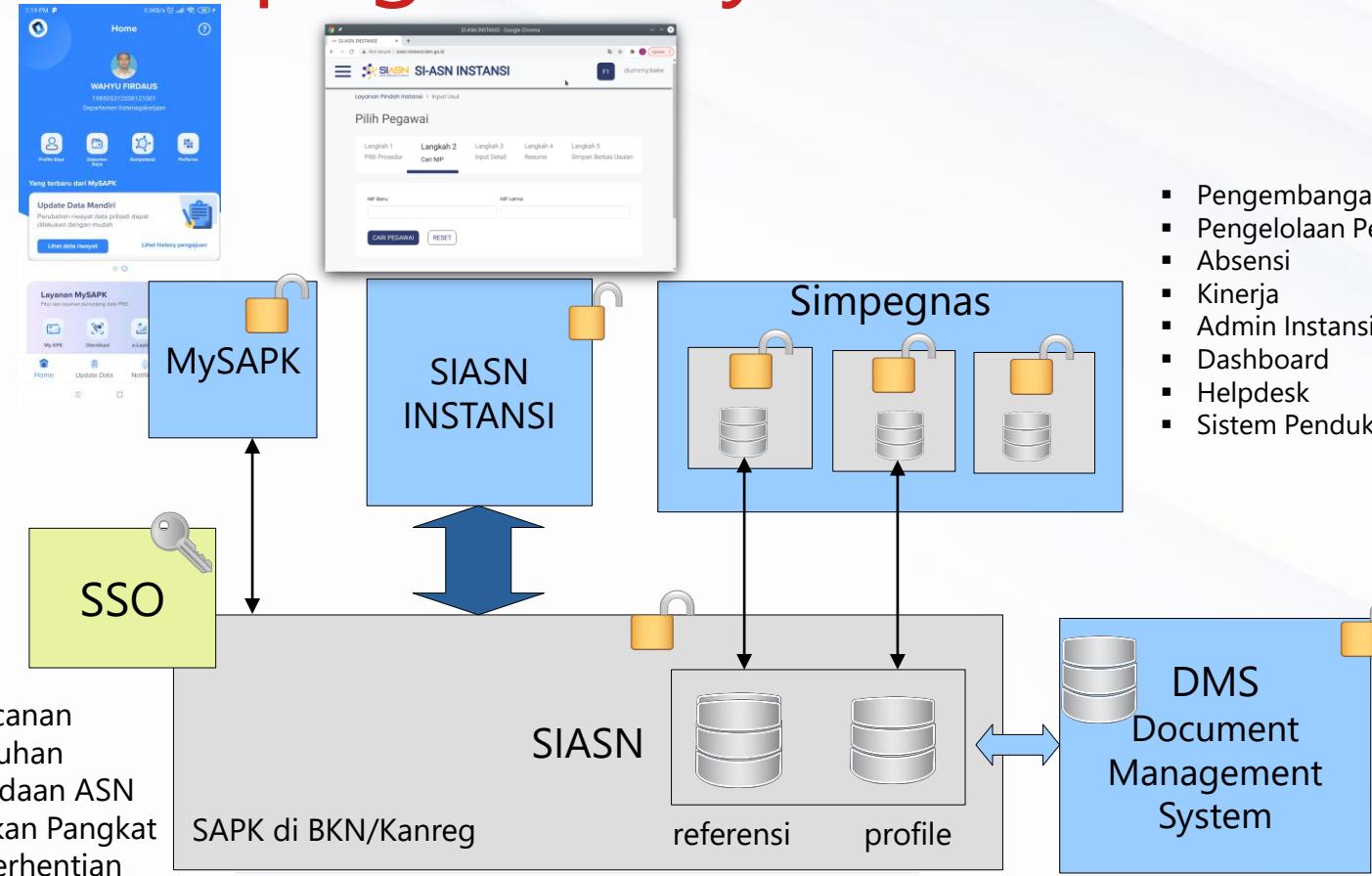
SIASN-Simpegnas-MySAPK



Acuan:
Proses Bisnis Layanan Kepegawaian (BKN)

- Layanan Elektronik Kepegawaian
- Data Kepegawaian
 - Data Referensi
 - Data Pegawai
- Dokumen kepegawaian (Pertek, SK, Formulir)
- Arsip Kepegawaian (Retensi Kepegawaian berbeda dengan Retensi standar)
- Layanan Identitas (SSO)

- Perencanaan Kebutuhan
- Pengadaan ASN
- Kenaikan Pangkat
- Pemberhentian
- Peremajaan Data
- Pindah Instansi
- Layanan SKK
- Layanan Wasdal
- Talent Manajemen
- Layanan Bankum
- Layanan Referensi
- Helpdesk



Ini yang
dilakukan

- Pengembangan
- Pengelolaan Pensiun
- Absensi
- Kinerja
- Admin Instansi
- Dashboard
- Helpdesk
- Sistem Pendukung

SIMPEG
Instansi

Indikator 36



Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

2017 - Kabupaten Lombok Barat. 1.0593 seconds

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 37



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait karsipan.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait karsipan seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait karsipan seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Karsipan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Karsipan Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Indikator 37

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi

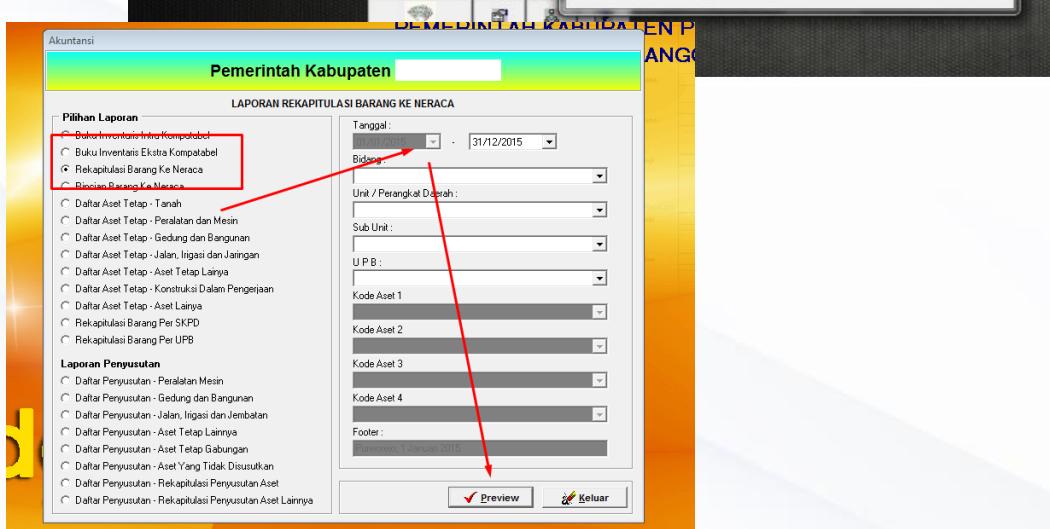


Indikator 38



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengelolaan barang milik negara.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengelolaan barang milik negara seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Indikator 38



“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi

Sistem Barang Milik Negara

- Instansi Pusat → SIMAK BMN
- Instansi Daerah → Asset daerah (accrual based), SIMDA Barang, SIMBADA, dsb
- Apakah terintegrasi dengan penganggaran, pengadaan, dsb.
- Contoh kesehatan (alat kesehatan di Puskesmas, RSUD), pendidikan (perpustakaan), dsb
- Fokus pada Asset TIK (aset berwujud dan aset tak berwujud)

Penganggaran

Pengadaan

Barang

Persediaan

Perencanaan

Pelaporan
Keuangan



Indikator 39



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengawasan internal pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengawasan internal pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengawasan internal pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Indikator 39



Ciri-ciri:

- Menjaga kerahasiaan, integrity, non repudation (nir sangkal)
- Apakah hard disk terenkripsi?
- Apakah admin bisa membaca nama dan informasi pelapor (enkripsi)
- Ditujukan ke Inspektorat

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Indikator 40



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			

Indikator 40

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi





Indikator 41



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria		Capaian
1	Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait kinerja pegawai.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait kinerja pegawai seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Akuntabilitas Berbasis Elektronik, Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

Indeks Prestasi Pegawai (IPP)

$$\text{IPP} = w1.A1 + w2.A2 + w3.A3$$

IPP → Tunjangan

$$\text{IPP} = 0 \rightarrow 100$$

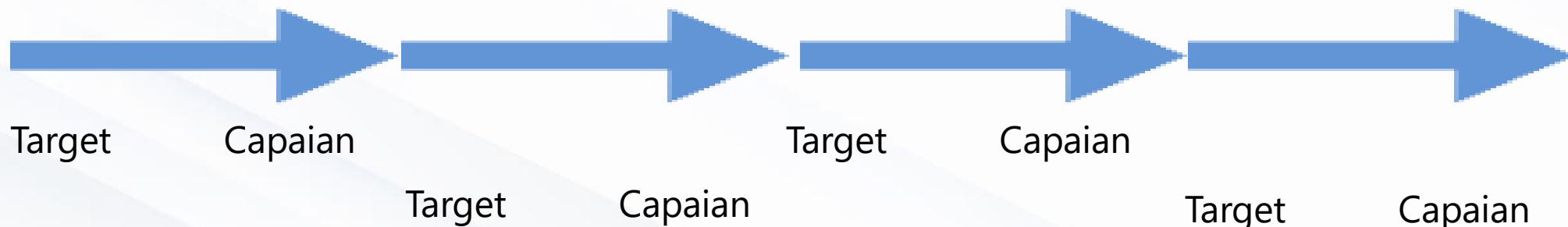
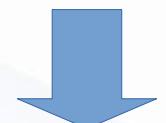
$$w1 + w2 + w3 = 100$$

A1: Disiplin (bulanan) ==> Ketaatan jam kerja, dan hukuman

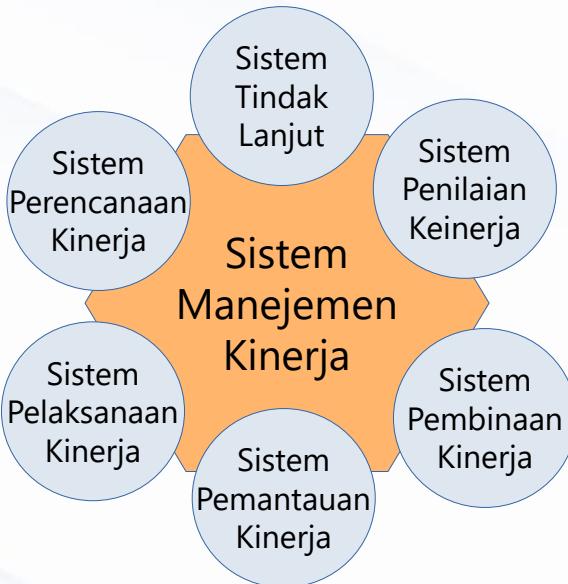
A2: Capaian Individu (3 bulan)

A3: Capaian Organisasi (6 bulan) ← dapat dari MKOK

Kinerja
Instansi



Indikator 41



Akan terkait erat dengan module Layanan Kepegawaian pada instansi



“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi

The screenshot shows the 'aplikasiSPK' application interface. The top navigation bar includes links for 'BERANDA', 'SKP', 'FORUM', 'LAPORAN', and 'DOKUMENASI'. The main content area displays a table with one record:

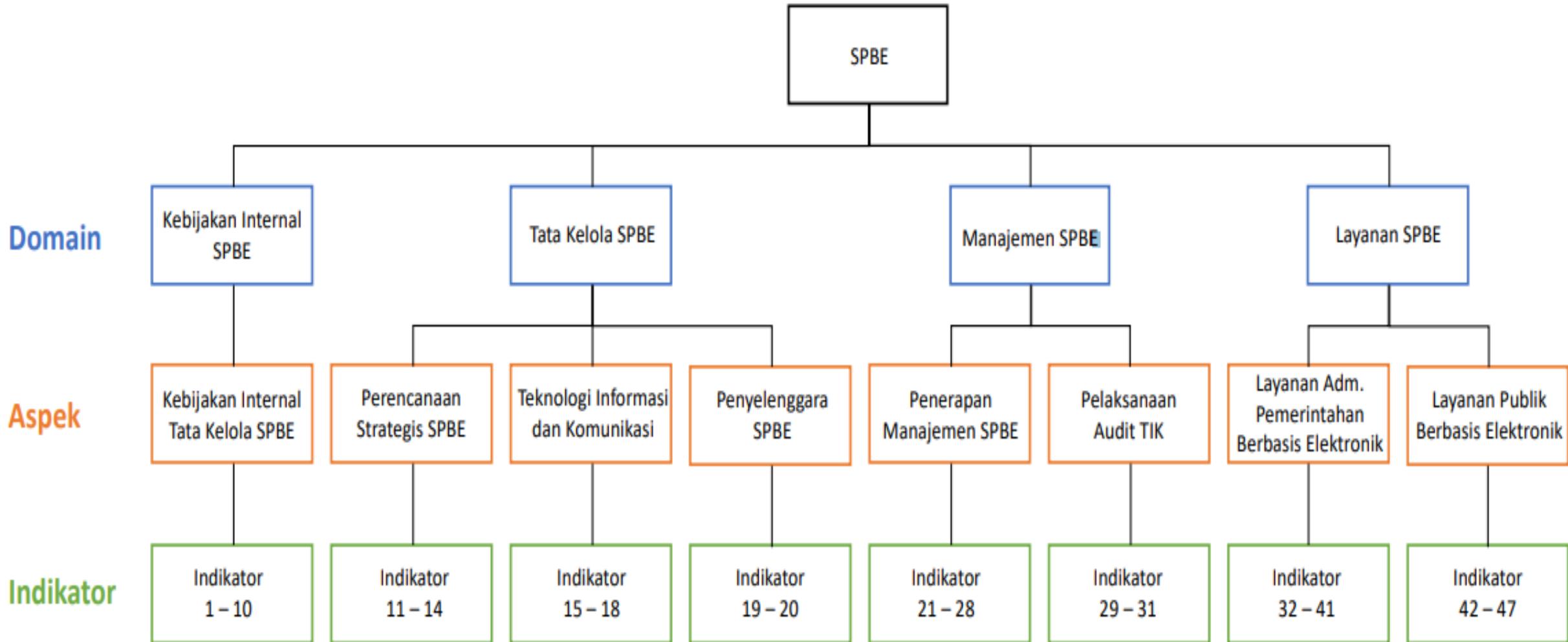
No	Aksi	Tahun	Status	Pegawai	Jabatan	Unit Kerja	Periode
1	Rincian SKP Edit Perencanaan Cetak PDF (PP 46/2011) Upload SKP Ttd	2019	sudah dimulai atasensi	Joshua Ariel Perkasa	Analis Pemerintahan Pusat	Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik	01-Jan-2019 s.d. 31-Dec-2019

Below the table, a message indicates 'Menampilkan 1 s/d 1 dari 1 data'. The footer of the application shows 'Aplikasi SPK © 2018. Version 1.0. Bagian SDM'.



Ringkasan Penerapan Instrumen Baru SPBE 2021

Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE





Domain 1: Kebijakan SPBE

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
1	Kebijakan internal Internal Arsitektur SPBE
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE
3	Kebijakan internal Manajemen Data
4	Kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE
5	Kebijakan internal Layanan Pusat Data
6	Kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemda
7	Kebijakan internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
8	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi
9	Kebijakan internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
10	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE



Domain 2: Tata Kelola SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE
11	Arsitektur SPBE
12	Peta Rencana SPBE
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
14	Inovasi Proses Bisnis SPBE
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi
15	Pembangunan Aplikasi SPBE
16	Layanan Pusat Data
17	Jaringan Intra Instansi
18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
Aspek 4	Penyelenggara SPBE
19	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE
20	Kolaborasi Penerapan SPBE



Domain 3: Manajemen SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi
23	Penerapan Manajemen Data
24	Penerapan Manajemen Aset TIK
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan
27	Penerapan Manajemen Perubahan
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE



Domain 4: Layanan SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
32	Layanan Perencanaan
33	Layanan Penganggaran
34	Layanan Keuangan
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
36	Layanan Kepegawaian
37	Layanan Kearsipan Dinamis
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (SIMAKBMN)--- focus asset IT, SIMDABMJ
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (WBS)
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (Lakip, e-Sakip, LPPD, e-kinerja)
41	Layanan Kinerja Pegawai (SIASN, SIMPEGNAS)



Domain 4: Layanan SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
43	Layanan Data Terbuka
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
45	Layanan Publik Sektor 1
46	Layanan Publik Sektor 2
47	Layanan Publik Sektor 3

Bobot Domain

Nomor Domain	Nama Domain	Bobot (%)
Domain 1	Kebijakan Internal SPBE	13,00
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25,00
Domain 3	Manajemen SPBE	16,50
Domain 4	Layanan SPBE	45,50
	Total Bobot	100,00



Bobot Aspek



Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot (%)
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13,00
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE	10,00
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10,00
Aspek 4	Penyelenggara SPBE	5,00
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12,00
Aspek 6	Pelaksanaan Audit TIK	4,50
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,50
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18,00
	Total Bobot	100,00



**TERIMA
KASIH**



**Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**





**INSTRUKTUR
DOMAIN TATA KELOLA SPBE
Ir. KHAKIM GHÖZALI, M.MT.**

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Riwayat Pendidikan

- S2, Manajemen Teknologi Informasi , Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.
- S1, Teknik Elektro – Komputer, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.



Pengalaman Profesi

Dosen / Akademisi Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Pengalaman SPBE

- 2020 : Evaluator Eksternal SPBE
- 1999 – 2018, Pengalaman Sebagai Evaluator TIK, antara lain: Review Implementasi Aplikasi Government Resources Management, Evaluasi Capaian Master Plan Smart City, Evaluasi Capaian Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi dan masih banyak lagi.
- 2001 – 2020, Pengalaman Penyusunan Rencana Induk SPBE/TIK di berbagai Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah
- 2012 – 2017, Pengalaman Sebagai Narasumber TIK di berbagai kesempatan
- 2000 – 2019, Pengalaman Dalam Pembuatan Aplikasi di banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah



MATERI
INSTRUMEN PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SPBE



DOMAIN 4 LAYANAN

Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik



Domain 4: Layanan SPBE



Indikator	Nama Indikator Domain Kebijakan SPBE
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
43	Layanan Data Terbuka
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
45	Layanan Publik Sektor 1
46	Layanan Publik Sektor 2
47	Layanan Publik Sektor 3

Tingkat Kematangan Layanan Publik



1

Memberikan informasi 1 arah

2

pencarian informasi, pengunggahan dokumen perencanaan, dan pengunduhan dokumen

3

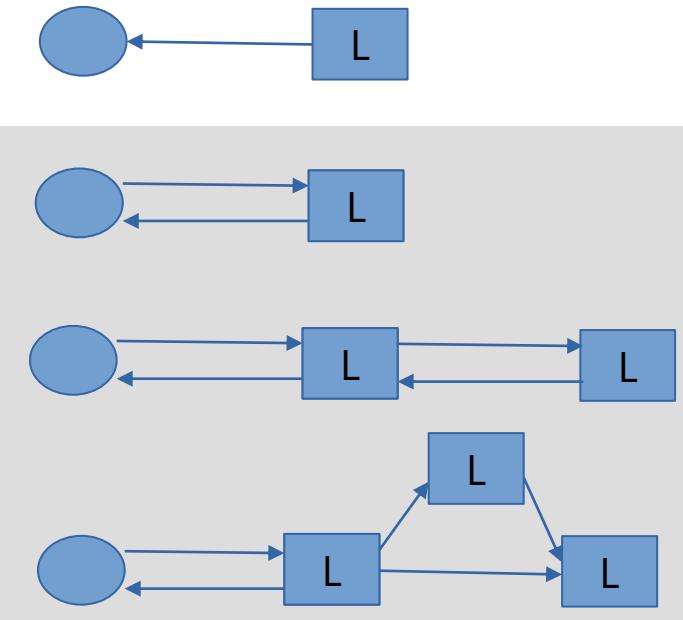
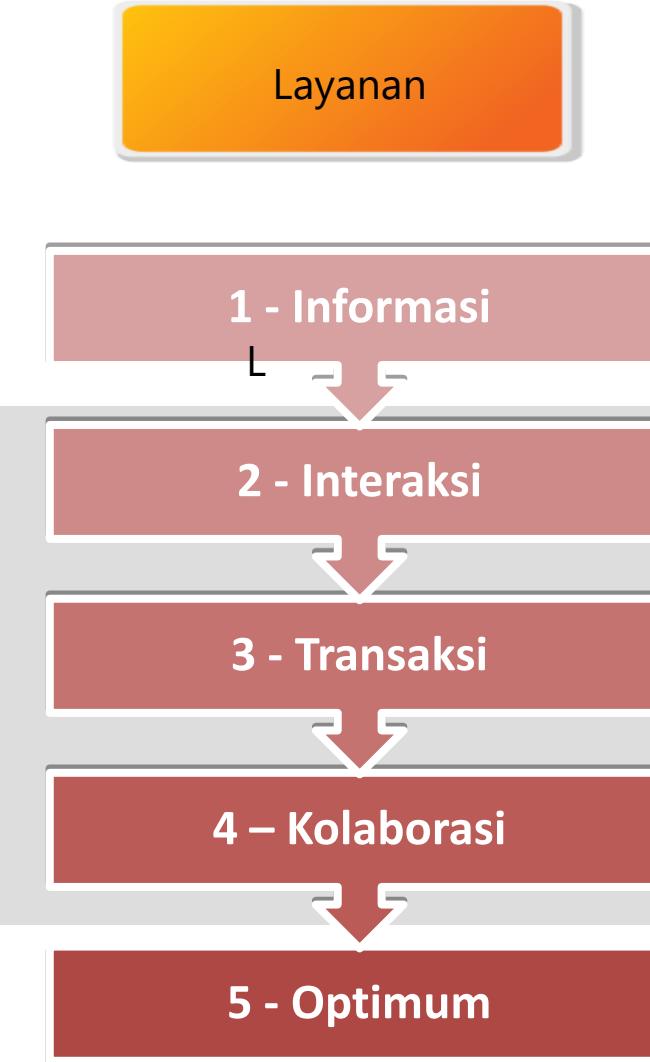
layanan transaksi kepada pengguna terkait perencanaan kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

4

Layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain

5

Dipantau, dinilai dan dievaluasi Berkala, ditindaklanjuti





INDIKATOR 42

LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- **Pengaduan Pelayanan Publik** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

- **Data pendukung** berupa
 - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
 - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
 - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
 - video penggunaan aplikasi,
 - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
 - arsitektur aplikasi,
 - pengelolaan repositori API,
 - unit kerja yang menangani manajemen layanan,
 - dan bukti terkait lainnya.
- **Data Pendukung** dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.





INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik		
Tingkat	Kriteria	Capaian	
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
1	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi pengaduan pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait pengaduan pelayanan publik seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) pelaporan pada layanan pengaduan publik.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengaduan pelayanan publik seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi , maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.



INDIKATOR 42 – LAYANAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware</i>/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>



Contoh Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

- SP4N Lapor - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
 - Dikembangkan bersama-sama oleh Ombudsman RI, KSP, Kementerian PANRB
- WiSE – Tempat pelaporan terintegrasi oleh Kemenkeu
- E Wadul
 - Aplikasi pelaporan online oleh Surabaya
- Pengaduan Publik Lainnya – dikembangkan oleh unit kerja/perangkat daerah



LAPOR – Layanan Pengaduan Publik KemenpanRB

PermenPAN RB 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional



lapor.go.id

 LAPOR!

TENTANG LAPOR!

MASUK

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang

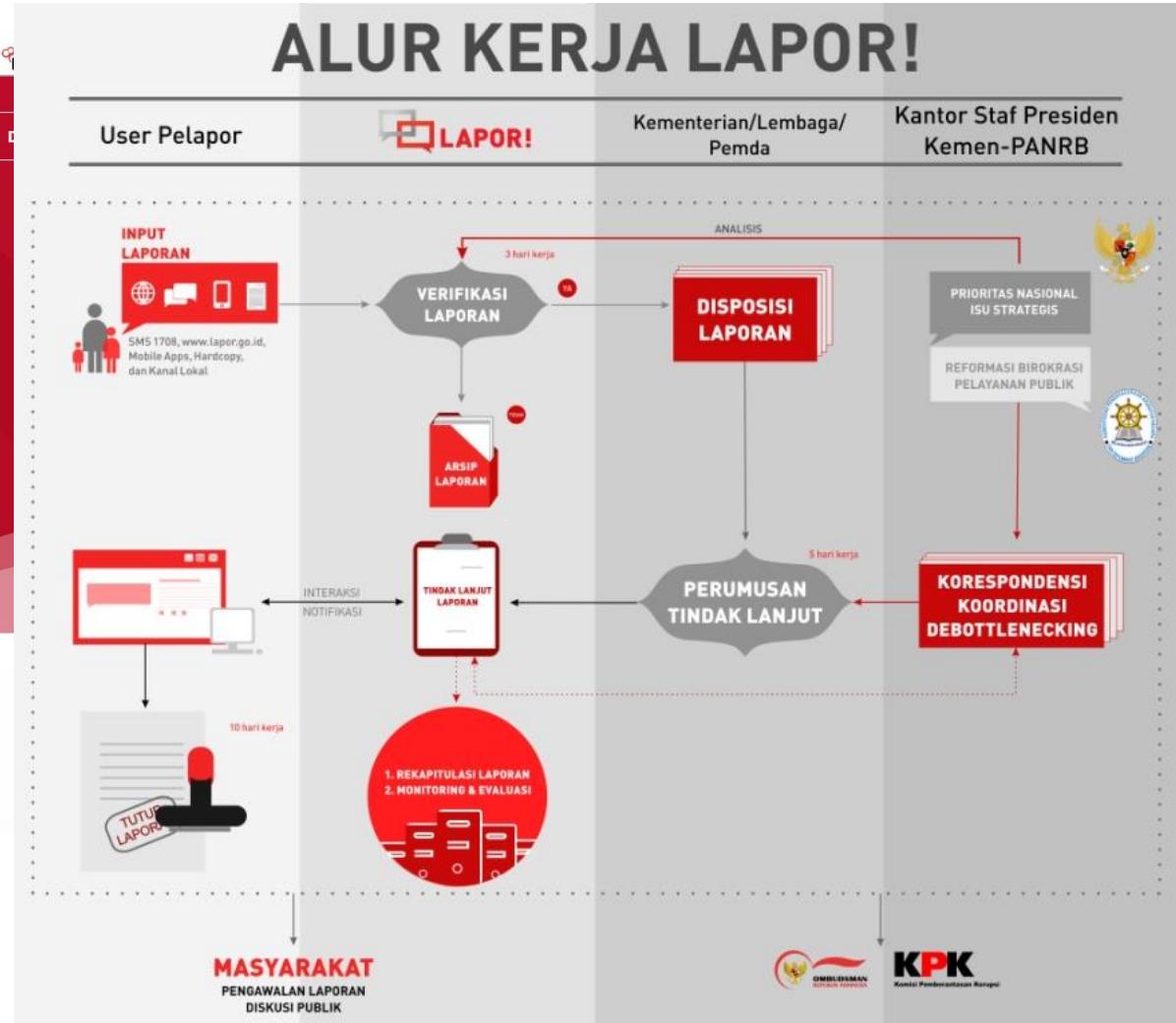
—

! Untuk laporan terkait COVID-19, gunakan hashtag #CORONA dan pilih kategori CORONA

PENGADUAN **ASPIRASI** **PERMINTAAN INFORMASI**

Ketik Judul Laporan Anda *

Ketik Isi Laporan Anda *





Studi Kasus : Integrasi berbagai media pengaduan dan SP4N LAPOR di Pemkot Surabaya



INFORMASI

Cari



MEDIA CENTER PEMERINTAH KOTA SURABAYA

- PELAYANAN INFORMASI (PPID KOTA SURABAYA)
- INFORMASI PERDAGANGAN
- INFORMASI HARGA POKOK
- WISATA KULINER SURABAYA
- NAMA DAN STATUS JALAN
- TRANSPORTASI
- STATISTIK SURABAYA
- KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
- PELAYANAN PERIZINAN
- DAFTAR INOVASI
- TAMAN-TAMAN DI KOTA SURABAYA
- TEMPAT PERIBADATAN

TWITTER : @SAPAWARGASBY

INSTAGRAM : @SAPAWARGASBY

FACEBOOK FAN PAGE : SAPAWARGA KOTA SURABAYA

WEBSITE : MEDIA CENTER SURABAYA

EMAIL : MEDIACENTER@SURABAYA.GO.ID

PPID KOTA SURABAYA

REKAPITULASI PERMINTAAN INFORMASI / KELUHAN MASYARAKAT

MOBILE APP E-WADUL

TELEPON : HOTLINE +6231 545-6290 | TOLL FREE +62-800-1404122

URABAYA

Contoh kasus – Level kematangan teknis layanan pengaduan publik TINGKAT 5
Sistem pengaduan publik **dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.**

The screenshot shows the 'Media Center' dashboard at mediacenter.surabaya.go.id. The dashboard has a red header and a white body. On the left is a sidebar with a user icon and a main navigation menu including Home, Keluhan, Users, Reports, and Master. The main area is titled 'DASHBOARD' and contains four colored boxes: a pink one for 'KELUHAN 16187', a teal one for 'TANGGAPAN 11345', a green one for 'USER 13261', and an orange one for 'INSTANSI 239'. Below these are three sections: 'MEDIA' (Twitter: 5882, Telepon: 809, Instagram: 342, Email: 74, Datang Langsung: 84, SMS: 434, lapor.go.id: 40), 'TOPIK' (SIUP: 587, Jalan Rusak: 481, PJU: 455, e - KTP: 399, Pelayanan: 235, air tidak keluar: 197, BLC: 181), and 'KATEGORI' (Keluhan: 4563, Permohonan Informasi: 3490, Saran: 236, Apresiasi: 151, Kritik: 120). At the bottom, a table titled 'KELUHAN' lists a single entry: Inge, Pak KK saya sampai mana kah di se-id dikabarkan sudah sampai kelurahan,tapi WEBSITE. A red arrow points from the text 'Memenuhi tingkat 4, adanya kolaborasi sistem' to the 'KELUHAN' table.

Media Center

MAIN NAVIGATION

- Home
- Keluhan
- Users
- Reports
- Master

DASHBOARD

KELUHAN 16187

TANGGAPAN 11345

USER 13261

INSTANSI 239

MEDIA

Twitter	5882
Telepon	809
Instagram	342
Email	74
Datang Langsung	84
SMS	434
lapor.go.id	40

TOPIK

SIUP	587
Jalan Rusak	481
PJU	455
e - KTP	399
Pelayanan	235
air tidak keluar	197
BLC	181

KATEGORI

Keluhan	4563
Permohonan Informasi	3490
Saran	236
Apresiasi	151
Kritik	120

KELUHAN

Foto	Nama	Keluhan	Media	Status	Tanggal
	Inge	Pak KK saya sampai mana kah di se-id dikabarkan sudah sampai kelurahan,tapi	WEBSITE	Beri Tinggalkan pesan	

© 2018 Media Center.
Version: 1.0.1

Memenuhi tingkat 4,
adanya kolaborasi sistem

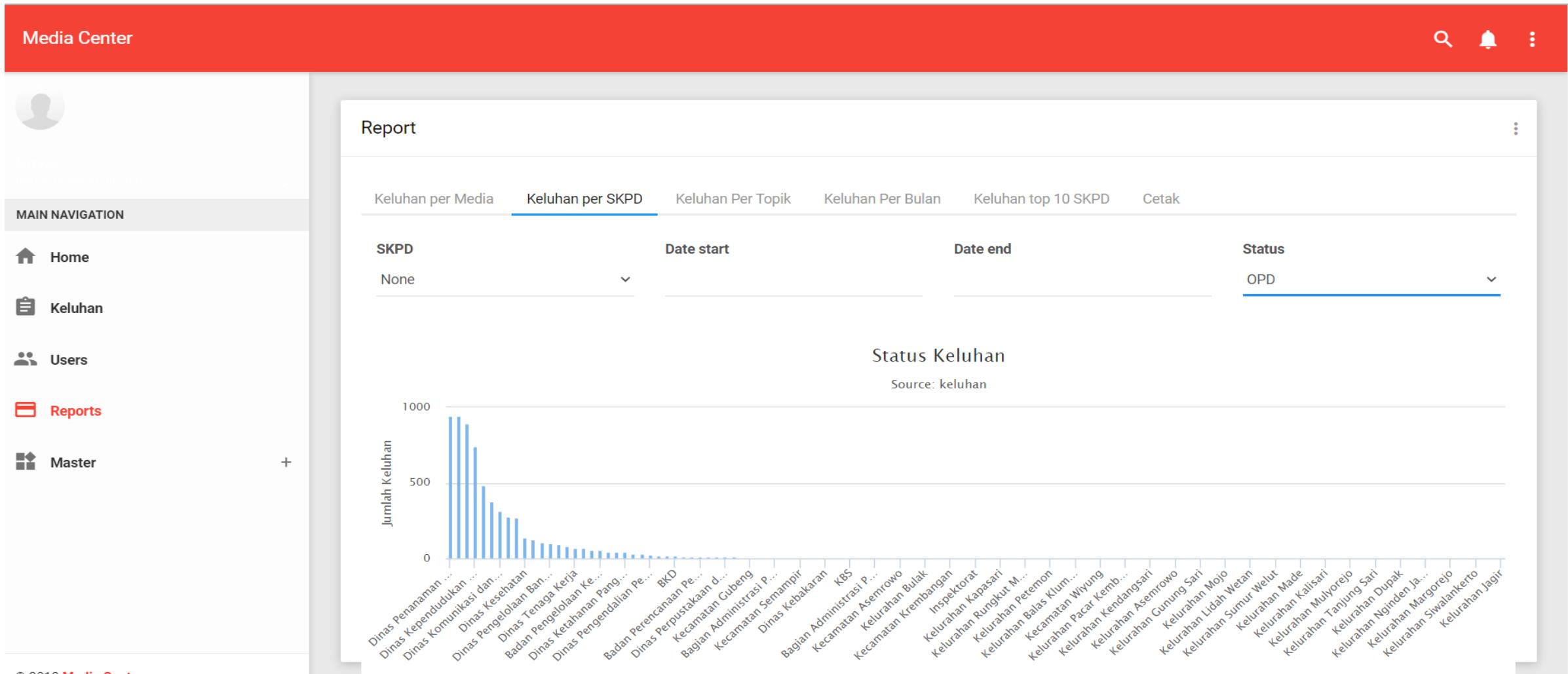
Data Dukung lainnya – berupa rekapan dan evaluasi tindak lanjut layanan pengaduan publik berbasis elektronik

	Indikator 14_c Keluhan Keseluruhan Januari 2017	13/12/2018 2:45
	Indikator 14_d Keluhan Keseluruhan Februari 2017	13/12/2018 2:45
	Indikator 14_e Keluhan Keseluruhan maret 2017	13/12/2018 2:45
	Indikator 14_f Keluhan Keseluruhan April 2017	13/12/2018 2:09
	Indikator 14_g Keluhan Keseluruhan Mei 2017	13/12/2018 2:09
	Indikator 14_h Keluhan Keseluruhan Juni 2017	13/12/2018 2:09
	Indikator 14_i Keluhan Keseluruhan Juli 2017	13/12/2018 2:10
	Indikator 14_j Keluhan Keseluruhan Agustus 2017	13/12/2018 2:09
	Indikator 14_k Keluhan Keseluruhan September 2017	13/12/2018 2:10
	Indikator 14_l Keluhan Keseluruhan Oktober 2017	13/12/2018 2:09
	Indikator 14_m Keluhan Keseluruhan November 2017	13/12/2018 2:09
	Indikator 14_n Keluhan Keseluruhan Desember 2017	13/12/2018 2:09

No	Tanggal	Identitas Pelapor	Keluhan	Jam Terima	Jam Integrasi	Jawaban	Keterangan
1	02-05-2017	Nama :- Alamat :- Telepon : 085708525274 Disampaikan melalui sms	Assalamu'alaikum wr.wb... Bu risma saya ini warga surabaya... Nama saya khoir... Saya 3 tahun yang lalu pernah mengurus surat pindah sudah sampai kecamatan tapi belum selesai trus sekarang saya mengurus kembali tapi lewat online tapi No NIK saya sudah tidak terdaftar.. Terus itu bagaimana bu tolong di jawab?? Nik 3578274302800004	08.56 WIB	09.03 WIB	Hasil koordinasi dg Dispendukcapil Sby dpt kami sampaikan bhw untuk pengurusan pindah yg sudah sampai di kecamatan dan tetunda 3 tahun dpt mengurus kembali ke Dispendukcapil Sby di Gedung Siola,Jl Tunjungan menuju ke loket pindah dg menawa photocopy da asli surat pindah tersebut. Trm ksh.	Disampaikan ke warga 2 Mei 2017 pkl.09.21 WIB
2	02-05-2017	Nama : Pipit Setiowati Alamat : Sukolilo, Telepon : 085707899xxx Disampaikan melalui Media Harian Jawa Pos	Pada 18 April saya ke Dispendukcapil Surabaya untuk mengubah data saya dan suami dalam Kartu Keluarga (KK). Kami membutuhkan data yang benar untuk mengurus tabungan haji. Semua kelengkapan berkas kami bawa. Salah satunya akta kelahiran yang sudah dilegalisasi dinas terkait. Namun, petugas Dispendukcapil tidak bersedia untuk mengubah nama suami yang kurang satu huruf di KK. Soalnya, nama yang tercantum di akta kelahiran berupa singkatan "Muh". Petugas itu menyarankan kami untuk mengurus revisi akta kelahiran. Padahal, di semua berkas yang dimiliki suami, baik ijazah , akta nikah, maupun surat	08.11 WIB	08.19 WIB	Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2017, dapat kami sampaikan bahwa mohon maaf atas ketidaknyamanan pelayanan yang Saudara alami. Jika diurutkan awal yang pertama kali dimiliki adalah Akta Kelahiran, apabila kemudian ada perbedaan data baik nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir dengan dokumen lainnya seperti ijazah / buku nikah / KTP / KK, maka yang menjadi dasar penulisan data adalah data pada dokumen pertama kami yang dimiliki warga negara yakni Akta Kelahiran. Untuk pengajuan perubahan nama di KK dan KTP dapat dilakukan dengan dasar Akta Kelahiran dan Surat Kawin (untuk yang sudah kawin) dengan mengisi form perubahan data di Dispendukcapil Kota Surabaya, Gedung Siola, Jl Tunjungan no 1	Disampaikan ke warga 4 Mei 2017 pkl.09.54 WIB



Data Analisis Pengaduan dan Solusinya





Data Analisis Pengaduan dan Solusinya



Media Center



MAIN NAVIGATION

Home

Keluhan

Users

Reports

Master

Report

Keluhan per Media Keluhan per SKPD Keluhan Per Topik **Keluhan Per Bulan** Keluhan top 10 SKPD Cetak

SKPD

None

Date start

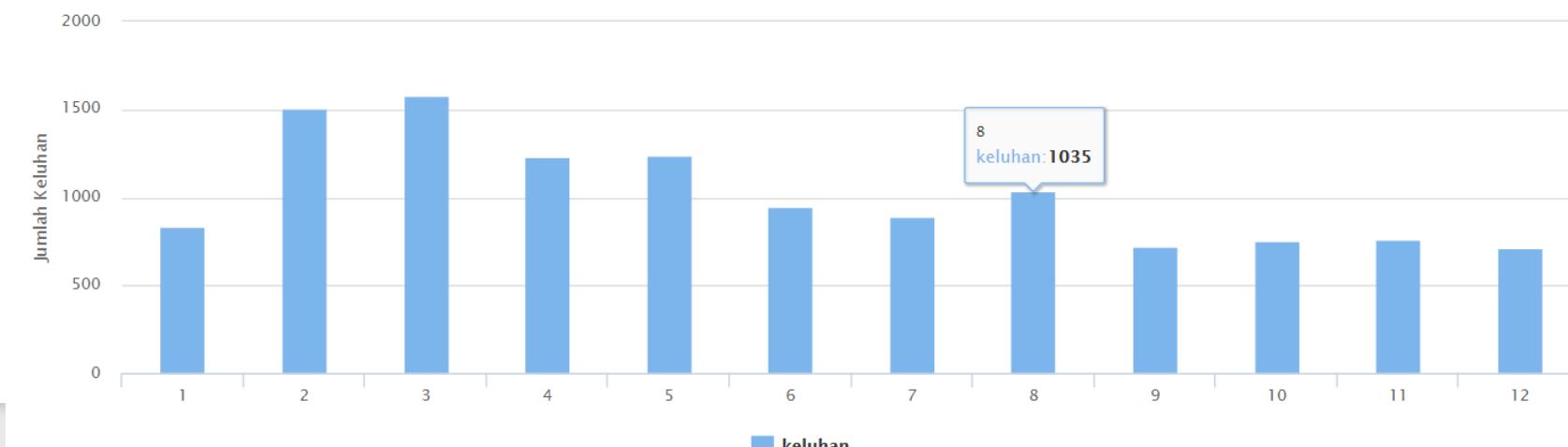
Date end

Status

Sudah terjawab dan sudah ditindak

Status Keluhan

Source: keluhan





INDIKATOR 43

LAYANAN DATA TERBUKA

LAYANAN DATA TERBUKA

- **Data Terbuka**(*Open Data*) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- Data Terbuka merupakan **sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagikan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.**
- Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



LAYANAN DATA TERBUKA

- **Data pendukung** berupa :
 - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
 - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
 - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
 - video penggunaan aplikasi,
 - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
 - arsitektur aplikasi,
 - pengelolaan repositori API,
 - unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
 - bukti terkait lainnya.
- Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.





INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik		
<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>		<i>Capaian</i>
1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen .		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data .		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain , misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Bukti Dukung
1	Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait data terbuka.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi data terbuka pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) data terbuka .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi , dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.



INDIKATOR 43 – LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Bukti Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>

The screenshot shows the BPS website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Beranda, Tentang Kami, Berita, Senarai Rencana Terbit, Publikasi, Berita Resmi Statistik, and PPID. The main content area is titled '1. Pilih Data' and includes sections for '1.1 Subjek' (dropdown menu 'Kependudukan'), '1.2 Indikator' (dropdown menu 'Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun Hasil Registrasi'), and '1.3 Waktu' (checkboxes for years 2013, 2012, 2011, and 2010, with 2013 checked). Below this, a larger screenshot of a web browser shows the 'SATU DATA INDONESIA' portal. The portal's homepage features a red background with a map of Indonesia and text 'Data Indonesia Dalam Satu Portal' and 'Temukan data Pemerintah dengan mudah!'. It includes a search bar with the placeholder 'Masukan kata kunci pencarian' and a magnifying glass icon.

“data dukung”

- Manual book
- Screenshot berjenjang level 1 - 5
- Tidak hanya menyertakan halaman login
- Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Open Data Pemprov Jawa Barat





Jakarta Open Data



data.jakarta.go.id

Appl Bookmarks FTP Directory: ftp://... Simlitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Загрузка статьи Sci-Hub: removing... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfig... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Ba

JAKARTA opendata

Selamat Datang di Portal
**Data Terbuka Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta**

Cari Data, Tema, Instansi

Cari Data

Data Organisasi Topik Visualisasi Infografis Tentang

Telusuri Berdasarkan Grup / Topik

COVID - 19 Kependidikan Kesehatan Keuangan Lingkungan Hidup

Statistik Portal Data Terbuka Jakarta

1839 Dataset	6118 File Data	53 Organisasi	27 Topik
--------------	----------------	---------------	----------

Ragu dengan berita
HOAKS atau FAKTA ?
Laporkan melalui
JALA HOAKS
0813-5000-5331

JALA HOAKS
data.jakarta.go.id/jalahoaks



Open Data Kota Bandung

OPENDATA
KOTA BANDUNG

Dataset Organisasi Grup Tentang Bantuan Versi 2.0

Users / Open Data Kota Bandung

OPEN DATA KOTA BANDUNG

Open Data Kota Bandung

Inisiatif dan komitmen Kota Bandung dalam semangat keterbukaan data untuk mewujudkan Bandung Juara dan Bandung Smart City.

Followers 0 Datasets 537

Edits 3.3k

Username administrator

Member Since July 23, 2017

State active

Datasets Activity Stream

Posyandu di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Dataset ini berisi mengenai data posyandu yang berada di wilayah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung

[CSV](#)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bandung
Dataset ini berisi data PDRB atas dasar harga berlaku Kota Bandung

[CSV](#)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Bandung
Dataset ini berisi data PDRB atas dasar harga konstan Kota Bandung

[CSV](#)

Jumlah Linmas di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
Dataset ini berisi data jumlah linmas di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

[CSV](#)

Jumlah Penduduk Tidak Tetap Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
Dataset ini berisi mengenai data jumlah penduduk tidak tetap di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung

[CSV](#)

APBD Kecamatan Buahbatu Kota Bandung
Dataset ini berisi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Buahbatu menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan...

[CSV](#)





INDIKATOR 44

LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)



L A Y A N A N J A R I N G A N D O K U M E N T A S I D A N I N F O R M A S I H U K U M (J D I H)

- **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.



LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

- **Data pendukung** berupa :
 - dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
 - *screenshot* layanan/sistem aplikasi,
 - URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan password *dummy* disampaikan jika ada),
 - video penggunaan aplikasi,
 - daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
 - arsitektur aplikasi,
 - pengelolaan repositori API,
 - unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
 - bukti terkait lainnya.
- **Data Pendukung** dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis dokumen.





INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik		
<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>		<i>Capaian</i>
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain , misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			



INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Data Dukung</i>
1	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi produk hukum pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) produk hukum.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data .	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi , dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.



INDIKATOR 44 – LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/<i>middleware/basis data</i> seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundangan, teknologi atau kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>

Evaluasi SPBE - Kemen | Post Attendee - Zoom | Page 1 - SPBE | 23 Oktober Jum'at - C | Badan Pusat Statistik | JDIHN | + | - | X

jdihn.go.id

www.oecd.org (PDF) Audit Maturit... AliExpress Booking.com Agoda.com Malaysia Airlines (v3.5:getting-started... v3.5:runtime_enviro... v3.5:runtime_frame...)

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

Tentang JDIHN | Anggota JDIHN | Agenda | Berita | Galeri Foto / Video | Ruang Unduh | FAQ | Login | Registrasi Integrasi

Khazanah Dokumen Hukum Indonesia

Temukan dokumen hukum yang Anda cari disini.

Klik di Sini

YURISPRUDENSI

PERUNDANG-UNDANGAN

PENELITIAN HUKUM

PUTUSAN PENGADILAN

ARTIKEL HUKUM

NASKAH AKADEMIK

Klik di Sini

Pencarian Kata Kunci Pencarian

Tipe Dokumen Jenis Dokumen Berdasarkan No Dokumen Masukkan Tahun Instansi Status

57.533 190.630 24.064 15.874 22.862 3.448

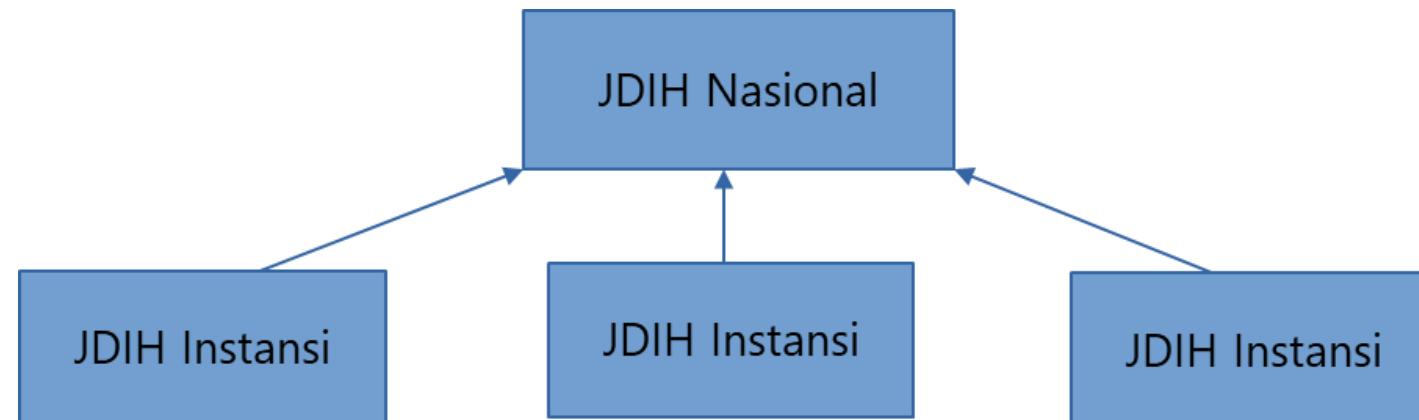
- “data dukung”
- Manual book
 - Screenshot berjenjang level 1 - 5
 - Tidak hanya menyertakan halaman login
 - Screenshot setiap proses penggunaan aplikasi



Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL





Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



Show

10

entries

Search:

Anggota	Website JDIH	Status Integrasi
Kementerian Agama RI	https://jdih.kemenag.go.id/	Sudah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	https://jdih.atrbpn.go.id/	Sudah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI (BUMN)	https://jdih.bumn.go.id/	Sudah
Kementerian Dalam Negeri RI	http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/index.php	Sudah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (KEMENDESA)	http://jdih.kemendesa.go.id/	Sudah
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM)	https://webjdih.esdm.go.id/	Sudah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	jdih.go.id	Pusat JDIH
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP)	http://jdih.kkp.go.id/	Sudah
Kementerian Kesehatan RI	https://jdih.kemkes.go.id/	Sudah
Kementerian Ketenagakerjaan RI	https://jdih.kemnaker.go.id/	Sudah

Showing 1 to 10 of 34 entries

Previous

1

2

3

4

Next





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BAGIAN HUKUM

NOMOR SOP	:
TGL PEMBUATAN	:
TGL REVISI	:
TGL EFektif	:
DISAHKAN OLEH	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum, Maslur, SH. Perata NIP. 19700701 199403 1 009
NAMA SOP	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, Dan Penerapan Standar Pelayanan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya;
- Keputusan Walikota Nomor 188/45/327/1436.1.2/2013 tentang Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Surabaya.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang sesuai
- Memiliki Pengetahuan tentang Pengelolaan website jdih.surabaya.co.id
- Memahami mekanisme pengelolaan dan admin website

KETERKAITAN :

- SOP Penomoran, Autentikasi, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Surabaya
- SOP Penomoran, Autentikasi, dan Pengundangan Peraturan Walikota Surabaya
- SOP Penomoran dan Autentikasi Keputusan Walikota Surabaya

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Komputer
- Telepon
- Instrumen
- Data base pelayanan SKPD/Unit pelayanan terkait Pemerintah Kota
- Ruang Kerja
- Kendaraan Operasional

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan sebagai data manual / arsip dan data elektronik

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Staf Administrator JDIH	Kasubag Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan dan identifikasi Produk Hukum			Himpunan Produk Hukum Daerah	5 Menit	Himpunan Produk Hukum Daerah	
2.	Melakukan scan untuk produk hukum berupa hardcopy kemudian mengolah data hasil scan dan diubah ke format PDF. Untuk softcopy langsung diubah ke format PDF			Himpunan Produk Hukum Daerah	40 Menit	File PDF	
3.	Mengecek file PDF, sebelum diupload ke server JDIH			File PDF	10 Menit	File PDF	
4.	Mengunggah softcopy produk hukum daerah ke website JDIH (jdih.surabaya.co.id)			File PDF	10 Menit	File PDF masuk ke server JDIH	

Contoh Tingkat 3 - Sistem JDIH menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.



INDIKATOR 45-47

LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3

LAYANAN PUBLIK

SEKTOR 1 - 3

- **Layanan Publik Sektor** adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- **Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik** yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- Layanan Publik Sektor yang dimaksud merupakan **layanan sektoral selain pada indikator 32 – 44**.





INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



Domain 4	Layanan SPBE	Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1-3 (.....)		
<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>		<i>Capaian</i>
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.		
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.		
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.		
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		
Jawaban:	Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5		
Penjelasan :			
Data dukung:			

<i>Tingkat</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Data Dukung</i>
1	Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik hanya memberikan layanan informasi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya informasi layanan sektoral pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang ditayangkan oleh sistem aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti pencarian informasi, pengunggahan dokumen Publik Sektoral, dan pengunduhan dokumen Publik Sektoral.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna , seperti adanya fitur pencarian, upload (unggah) dan/atau download (unduh) .
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait Publik Sektoral kegiatan pemerintah seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data.	Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi , dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi .



INDIKATOR 45- 47 LAYANAN PUBLIK SEKTOR 1-3



Tingkat	Kriteria	Data Dukung
4	<p>Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain, dan/atau layanan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.</p>
5	<p>Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Layanan Publik Sektoral Berbasis Elektronik telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.</p>	<p>Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;</p>



Contoh Layanan Publik selain layanan pada indikator 32 – 44



1. Administrasi

- Kemenkeu (DJP Online)
- Kota Banjarmasin (Palui- Administrasi Kependudukan Terpadu)
- Kota Surabaya (SSW - Surabaya Single Window)

2. Jasa

- Kab Tangerang (Tax Shopping, Perpajakan terintegrasi dengan sektor swasta)
- Kota Balikpapan (SIMRS - Sistem Rumah sakit terpadu)

3. Barang

- KemenKominfo (Sistem Informasi Manajemen Spectrum)
- LAPAN (Pelayanan Data Penginderaan Jarak Jauh)



Layanan Perijinan Satu Pintu



ssw.surabaya.go.id

bookmarks FTP Directory: ftp://... Simlitabmas : Siste... Install SquirrelMail... Logout GenYoutube.net Tutorial Cara Konfigurasi... (1) WhatsApp ipk Cara Jitu Solo Back... IC3INA 2019 Exploit Database -... CND | C

Home Masuk Registrasi Dashboard

Panduan Monitoring Panduan Cetak SK

Surabaya Single Window



Perizinan Paket Investasi
Pengajuan paket investasi dilengkapi fitur peta



Pendaftaran Izin Parsial Mandiri
Permohonan perizinan reguler secara online



Monitoring Berkas SSW
Melihat progres / status berkas yang berjalan



Verifikasi Berkas SSW
Pemeriksaan kelayakan administrasi berkas SSW



Simulasi Penapisan
Rekomendasi Penentuan Paket SSW



Contoh Penyusunan Dokumen
Unduh dan ketahui cara penyusunan dokumen SSW

Layanan Pembayaran Pajak BPHTB

(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)



Utama Tentang BPHTB Alur Sistem Peraturan Kanal Pembayaran

Masuk

Alur e-BPHTB



Wajib Pajak/PPAT melakukan login ke pajakonline.jakarta.go.id dan pilih menu BPHTB



Wajib Pajak/PPAT masukkan NOP PBB yang akan ditransaksikan BPHTB-nya



Sistem melakukan pengecekan tunggakan PBB



Jika tidak terdapat Tunggakan maka Wajib pajak mengisi SSPD BPHTB beserta mengunggah dokumen-dokumen persyaratan



Petugas akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang diunggah beserta data SSPD BPHTB yang diisi oleh Wajib Pajak/PPAT



Jika Ditolak WP melakukan perbaikan data dan dokumen, Jika diterima maka wajib pajak membuat Kode Bayar



Wajib Pajak/PPAT **MEMBAYAR Kode bayar melalui Kanal Pembayaran** yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI



Wajib Pajak/PPAT mengunggah Dokumen AJB yang sudah ditandatangani dan memberikan tanggal ajb



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA